

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

Raflyan Mandana

KEKERINGAN, BTT BELUM DIGELONTORKAN

PEMPROV DIDESAK MAKSIMALKAN MITIGASI

SERANG, BANPOS - Fenomena El Nino yang melanda Provinsi Banten dampaknya kian meluas dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kekeringan yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam hasil panen para petani akibat lahan pertanian yang mengering, tetapi juga menyebabkan warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.

BACA PEMPROV DIDESAK HAL - 9



DZIKI OKTOMAUJIYADIBANTEN POS

SERAPAN BANKEU DESA RENDAH

SERANG, BANPOS - Penyerapan bantuan keuangan desa dari Pemerintah Provinsi Banten hingga memasuki triwulan III 2026 baru mencapai 38 persen. Dinas Pemberdayaan Masyarakat

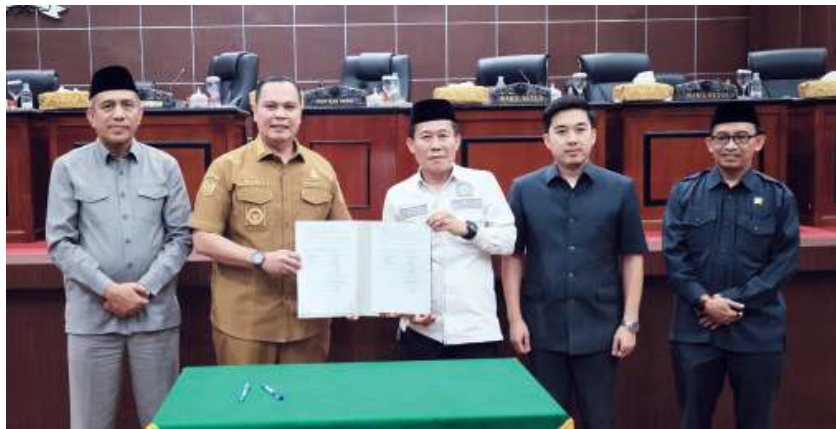
dan Desa (DPMD) Banten menjelaskan bahwa rendahnya serapan salah satunya disebabkan masih banyak pemerintah desa yang belum menerbitkan laporan pertanggungjawaban atau su-

rat pertanggungjawaban (SPJ) anggaran tahun sebelumnya.

Kepala DPMD Banten Gunawan Rusminto mengatakan persentase tersebut merupakan agregat dari 1.238 desa di

Banten. Menurut dia, Kabupaten Lebak dan Tangerang menjadi daerah dengan persentase pencairan relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya.

BACA SERAPAN HAL - 9



APBD PERUBAHAN DISEPAKATI

INFRASTRUKTUR DIKEJAR HINGGA AKHIR TAHUN

SERANG, BANPOS - Pemerintah Kota Serang bersama DPRD Kota Serang menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Serang. Kesepakatan tersebut menjadi langkah

pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan hingga akhir tahun, dengan sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama.

Walikota Serang Budi Rustandi
BACA INFRASTRUKTUR HAL - 9

ACENG MURTADO/BANTEN POS



Tradisi Ngeropok Maulid di Sentul Sukawana

Oleh: Aceng Murtado

SUASANA berbeda terasa di Lingkungan Sentul Sukawana, RT 01 RW 07, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang, Kota Serang. Sejak pagi, masyarakat memadati lingkungan kampung untuk

mengikuti tradisi ngeropok dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

Bagi masyarakat setempat, ngeropok bukan sekadar tradisi berkumpul dan menikmati hidangan bersama. Tradisi
BACA TRADISI HAL - 9

KEJAKSAAN DIDESAK
OBJEKTIV DAN TRANSPARAN

03

PERKIM PERKETAT PEMERIKSAAN
KESEHATAN POHON

06

SAID IQBAL DORONG
PENYEGELAN EKS PT JABATEX

12

LIBUR MAULID NABI DI BANTEN LAMA

Foto udara wisatawan memadati wisata religi Masjid Agung Banten Lama, Kota Serang, Selasa (25/8). Sebagian besar warga memanfaatkan libur Maulid Nabi untuk berwisata dan berziarah ke Banten Lama mengajak anak-anaknya untuk mengenalkan sejarah kejayaan kesultanan Banten pada zaman dulu.



DZIKI OKTOMAUJIYADIBANTEN POS

RUU PERAMPASAN ASET MASIH BERGULIR

JAKARTA, BANPOS - Wakil Ketua DPR Sari Yulianti memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset masih bergulir saat menjawab aspirasi Forum Komunikasi Rakyat Pati, Jawa Tengah.

"Untuk percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset saat ini di

BACA RUU HAL - 9



BANPOS CHANNEL

WWW.BANPOS.CO

BANTENPOS@GMAIL.COM

BANTEN_POS

BANTEN POS

HARGA ECERAN
RP 4.000

Kapolda Banten Apresiasi Pengurus Masjid Lewat Hadiah Umrah



Ratusan Warga Serang Berangkat ke Jombang

Delegasi NU Banten Didorong Bawa Gagasan Baru dari Muktamar ke-35

SERANG, BANPOS - Gubernur Banten Andra Soni berharap delegasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten membawa gagasan dan pengalaman baru dari Muktamar ke-35 NU untuk mendukung pengembangan pondok pesantren di Banten. Harapan tersebut disampaikan Andra saat melepas delegasi PWNU Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (25/8).

Menurut Andra, NU memiliki peran penting dalam memperkuat nilai keagamaan sekaligus mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui pendidikan pesantren. “Pemprov Banten berharap keluarga besar NU terus menjadi bagian penting dalam revitalisasi nilai keagamaan. Kami juga berharap delegasi PWNU dapat membawa pulang gagasan baru untuk pengembangan pondok pesantren di Banten,” kata Andra.

Ia juga berpesan agar delegasi PWNU Banten membawa sema-

ngat perjuangan para ulama Banten dalam memperkuat nilai kebangsaan dan keagamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Andra menyebut Banten memiliki sejarah penting dalam perjalanan NU. Salah satunya ketika Muktamar ke-13 NU digelar di Meneas, Kabupaten Pandeglang, pada 1938. “Kehadiran peserta muktamar dari PWNU Banten tidak hanya membawa nama organisasi, tetapi juga membawa tradisi keulamaan dan semangat masyarakat Banten,” ujarnya.

Menurut Andra, NU telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa

Indonesia, terutama dalam menjaga tradisi keislaman moderat dan kecintaan terhadap Tanah Air. Ia juga menilai NU memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan pembentukan generasi penerus bangsa.

Sekretaris PWNU Banten Ahmad Nuri mengapresiasi perhatian Pemprov Banten terhadap delegasi yang akan mengikuti Muktamar ke-35 NU. Ia menegaskan NU akan terus menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Banten. “NU selalu bermitra dengan Pemprov Banten. Siapa pun yang terpilih dalam muktamar nanti, itu adalah hasil keputusan

SERANG, BANPOS - Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki memberikan hadiah ibadah umrah kepada Ustaz H. Muhaidi, selaku imam sekaligus pengurus dan penjaga Masjid Baiturrahman Pold Banten, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya. “Ini merupakan bentuk apresiasi dan rasa terima kasih atas pengabdian serta keikhlasan

Pengurus Masjid Baiturrahman Pold Banten Ustadz H. Muhaidi, berjabat tangan dengan Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki di Serang.

Ustaz H. Muhaidi dalam menjaga dan memakmurkan Masjid Baiturrahman,” kata Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, di Serang, Senin (24/8).

Hengki berharap perjalanan spiritual Ustaz Muhaidi ke Tanah Suci diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan. Ia juga mendoakan agar umrah tersebut menjadi umrah yang mabrur dan diterima oleh Allah SWT.

Lebih lanjut, ia berharap keberangkatan tersebut tidak sekadar menjadi perjalanan ibadah, tetapi juga momentum untuk memperkuat keimanan serta membawa

keberkahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar saat kembali ke Tanah Air. “Semoga diberikan kemudahan dalam setiap rangkaian ibadah, dan sepulang dari Tanah Suci semakin membawa kebaikan bagi lingkungan Pold Banten,” tambahnya.

Sementara itu, Ustaz H. Muhaidi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Kapolda Banten yang telah memberikannya kesempatan untuk memenuhi panggilan ke Baitullah.

Baginya, hadiah tersebut merupakan anugerah yang sangat berarti setelah sekian lama mengabdikan diri dengan ikhlas merawat Masjid Baiturrahman. “Jazakumullah khairan. Semoga panjang umur, sehat, berkah hidupnya dan diberikan kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Doa saya untuk Kapolda, terima kasih Bapak Kapolda Banten,” tuturnya.(ANT/PAY)

kader NU jika tidak ada halangan.

Ia menegaskan Pemkab Serang akan terus memperkuat sinergi dengan organisasi kemasyarakatan Islam, termasuk NU dan Muhammadiyah. “Kita perlu sinergi yang kuat. Saya yakin kita bisa bersama-sama menjadikan Kabupaten Serang lebih baik. Kalau ulama dan jamaahnya rukun dan damai, insya Allah Kabupaten Serang akan menjadi kabupaten yang rukun dan damai,” ujarnya.

Ketua PCNU Kabupaten Serang Muhammad Robby mengatakan sekitar 300 orang dari Kabupaten Serang berangkat menuju Jombang. Sebanyak 240 orang berangkat menggunakan empat bus dari Pendopo Bupati Serang, sedangkan 60 orang lainnya diberangkatkan dari Kecamatan Jawilan. “Sebanyak 240 orang berangkat menggunakan empat bus dari pendopo, sementara 60 orang lainnya diberangkatkan dari Kecamatan Jawilan,” katanya.(ANT/PAY)

RUANG PUBLIK

Merawat Adab dan Tradisi Keceran di Pangkuan Cipaung:

74 Warsa Jejak Kesti TTKKDH Menjaga Marwah Banten

OLEH:

Cecep Nikmatullah
Pengurus DPW Kesti TTKKDH Provinsi Banten & Pemerhati Pendidikan dan Kebudayaan Tradisional Banten.



DESIR angin malam di Kampung Cipaung, Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Kamis (20/8/2026) terasa jauh lebih hidup dari biasanya. Hawa dingin perbukitan yang perlahan turun seketika terpecah oleh dentum gendang dan lengkingan terompet patingtung. Ratusan pesilat berpakaian hitam-putih lengkap dengan kain sarung yang tersampir di pundak mulai berdatangan dari berbagai penjuru, membaur dan meramaikan lapangan kampung dalam suasana penuh kegembiraan.

Kegiatan di Kampung Cipaung malam itu punya arti tersendiri bagi warga TTKKDH. Pertemuan lintas generasi terse-

but menjadi panggung perayaan 74 tahun napas perguruan, yang dipadukan utuh dengan sakralnya tradisi Keceran warisan para sesepuh.

Aroma bukhur dan dupa menguap perlahan ke udara malam, berkelindan dengan lantunan tawusul serta lirih suara zikir. Suasana kian hening saat tilawah dari sang qari mengalun bening, disusul untaian doa yang diamini dengan penuh harap. Di pelataran, para sesepuh perguruan duduk berjajar berdampingan dengan tokoh masyarakat dan jajaran pengurus dari tingkat ranting hingga pusat. Malam itu, sekat kedudukan dan gelar seolah tanggal; semua larut dalam kehangatan persaudaraan yang tulus apa adanya.

Meniti Hakikat Tetesan Air Keceran

Bagi insan persilatan di Tanah Jawara, tradisi keceran pantang diperlakukan sekadar ritual penggugur kewajiban tahunan. Di balik heningnya prosesi, ada laku batin yang khidmat. Tetesan air ramuan ke pelupuk mata para pesilat hakikatnya adalah ikhtiar menyucikan pandangan—memasuh remah-remah keangkuhan agar mata batin kembali awas melihat kebenaran. Sebab, kepekaan nurani dan kerendahan hatilah yang kelak

menuntun langkah seorang ksatria. Tradisi ini menggariskan sebuah titah sederhana: sebelum tangkas merubuhkan lawan di gelanggang, seorang pendekar harus lebih dulu tunduk dan mampu menaklukkan hawa nafsunya sendiri di hadapan Sang Khalik.

Udara dingin dan kabut yang perlahan turun membuat malam di majelis itu terasa makin khidmat. Saat Ridho Dinata, Sekretaris Wilayah DPW Kesti TTKKDH Banten, naik ke panggung, suasana mendadak sunyi. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Dengan tutur kata yang tertata dan berwibawa, ia mengurai pesan-pesan perguruan yang tidak sekadar terdengar tegas di telinga, tetapi juga meresap ke batin para pendekar.

Di hadapan para pendekar, Ridho mengingatkan bahwa menapaki usia ke-74 bukanlah momen untuk berbangga diri. Usia ini adalah cermin keuletan keluarga besar TTKKDH dalam menjaga kemurnian ajaran para sesepuh dari masa ke masa.

“Ilmu di TTKKDH bukan semata perkara kelihaian fisik atau kekuatan raga,” tuturnya. “Ruh kita terletak pada akhlak dan kerendahan hati. Jangan sampai ada sedikit pun ruang bagi rasa takabur dalam diri

seorang pendekar.”

Bagi Ridho, ritus Keceran sejatinya adalah saatnya menundukkan kepala dan berkaca ke dalam diri. Ia mewarti-wanti para pesilat agar tak mengotori marwah tradisi ini.

“Setiap tetes air keceran itu mengingatkan sumpah batin kita. Silat Cimande lahir bukan untuk jago-jagoan atau unjuk gagah di jalanan, melainkan pelindung mereka yang lemah dan penegak kebenaran. Ukuran pendekar sejati bukan seberapa banyak lawan yang kita robokkan, tapi sejauh mana kita mampu menundukkan ego sendiri,” tegasnya.

Menjawab Arus Digitalisasi Tanpa Kehilangan Akar

Sorotan Ridho lantas tertuju pada anak-anak muda di hadapannya. Di tengah kepuangan zaman serba cepat dan serbuan layar digital, ia berpesan agar para pesilat belia tak lekas silau. Baginya, anak muda harus punya isi kepala yang tajam dan meleak zaman, tetapi kakinya tetap menjejak kokoh pada tanah tempat tradisi mereka berakar.

Bagi generasi muda TTKKDH, merawat warisan perguruan tak cukup lagi sebatas mengurung diri di sanggar atau sibuk merapikan ritus di atas karpet padepokan. Tantangan hari ini

memanggil mereka untuk turun ke jalan, menyingsingkan lengan baju, dan menjadi jawaban atas berbagai kegelisahan warga. Di pundak para pesilat belia inilah terpicul amanah ganda: menjadi motor penggerak pembangunan tanah Banten, hadir paling muka saat kerja-kerja kemanusiaan memanggil, sekaligus tampil sebagai penyejuk di tengah masyarakat yang kian mudah tersulut perselisihan.

Suasana pelataran Cipaung kian hidup begitu jurus Tjimande Tari Kolot mulai dimainkan di panggung. Mengikuti ketukan rancak tabuhan nayaga, para pesilat bergantian merangkai gerak dengan presisi. Ada daya pikat tersendiri saat gemulai liukan tari tradisi tiba-tiba berpadu rapat dengan kokohnya tangkisan dan hentakan kaki yang bertenaga.

Pemandangan tersebut kian berkesan ketika anak-anak belia masuk gelanggang, memasang kuda-kuda bersisian dengan para sesepuh yang rambutnya telah memutih dimakan usia. Pemandangan lintas generasi ini menjadi penegas sederhana namun kuat: di tanah Taktakan, denyut warisan leluhur tak pernah terputus—ia terus berpiindah tangan dengan tenang, mengalir dari peluh para kasepuhan ke dada generasi belia.

Menjaga Amanah, Meniti Sejarah

Kehadiran Kesti TTKKDH di tanah Pancur bukanlah riwayat baru. Sejak kali pertama menanamkan tonggakinya pada 1952, perguruan ini sudah menyatu dalam denyut keseharian warga. Di sini, silat tak pernah dipandang sebatas olah kanuragan atau ketangkasan raga semata, melainkan laku hidup—tempat bertemunya kedalaman rasa tasawuf Islam dengan keteguhan adat yang diwariskan para sesepuh Banten.

Di penghujung malam, ritus inti Keceran berlangsung penuh takzim di bawah tuntunan para sesepuh. Para anggota duduk bertafakur, menyambut tetesan air tradisi yang sarat makna pembersihan diri. Momen sakral ini menjadi pengingat batin bagi setiap pendekar untuk terus merawat sumpah Panca Setia TTKKDH—menjadikannya pegangan adab di mana pun raga berpijak.

Suasana malam itu akhirnya dipungkasi dengan doa bersama yang dipimpin para sesepuh. Di tengah hening yang merayap, bait-bait doa terucap lirih—menitipkan harapan untuk kedamaian negeri, keteguhan persaudaraan perguruan, serta limpahan berkah bagi Tanah Jawara.

Dari tanah Cipaung, sebuah keyakinan kembali dipancarkan. Modernitas boleh saja terus melaju, namun marwah Cimande punya jalannya sendiri untuk bertahan. Sepanjang kendang patingtung tetap bertalu dan air keceran terus menunjukkan hati, api persaudaraan serta ajaran para sesepuh akan tetap terjaga di tangan generasi penerusnya.*

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

PEMBINA

Kiki Iswara Darmayana

KOMISARIS UTAMA

Karim Paputungan

KOMISARIS

Maria Hanief

DIREKTUR

Rumi Nugraha dan M. Fahmi

PT BANTEN BERITA MERDEKA

Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan

Blok D, No.3, Kota Serang, Banten

Telephon/Fax: (0254) 407 8285

No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001

BCA -2454 061 704

(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:

WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

DEWAN REDAKSI: Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, M. Fahmi, Saepudin, Chandra Magga

JAWAB: Chandra Magga

REDAKTUR PELAKSANA: Azmart Tusnedi

REDAKTUR: Ghuroofie Dzhillilhub, Stefano, Dedi Rustandi

REPORTER: CH Widodo Haidar, Dede Suhada, Suganda, M. Wahyu, Taufiq Solehudin, Edwin Mahesa Pardede

PRA CETAK & PERWAJAHAN: Supriadi (Manager), Fauzi Sandi, M Sy Ian Sangadji

ACCOUNTING: Ifroh Hardianti

ADMINISTRASI KEUANGAN: Azi Abdurrohman

ADMINISTRASI PAJAK: Nadia Al Vani

ADMINISTRASI: Nia Aryanti

PEMASARAN: Eply Wahyudi

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Saepudin

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG

SEKRETARIS REDAKSI: Cahya Andini

Sobar Rohmat

IKLAN: Zulfa Nadira

GRAFIS: Ahmad Bukhori

Eply Wahyudi

PERWAKILAN TANGERANG :

Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2

Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

PERWAKILAN JAKARTA :

Gedung Graha Pena, Lantai 5

Jalan Kebayoran Lama No.12,

Jakarta Selatan

Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN :

PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

TARIF IKLAN

TARIF IKLAN		ADVERTORIAL		IKLAN CILIK/BARIS Rp. 23.000/baris - Minimal 3 baris - Maksimum 7 baris
Hitam Putih (BW)	: Rp. 47.000/mm kolom	Hitam Putih (BW)	: Rp. 47.000/mm kolom	
Warna (FC)	: Rp. 69.000/mm kolom	Warna (FC)	: Rp. 69.000/mm kolom	
SOSIAL/KELUARGA				
Hitam Putih (BW)	: Rp. 30.500/mm kolom			
Warna (FC)	: Rp. 54.500/mm kolom			

KOTA BADAK



Para peserta saat mengikuti lomba kerakyatan.

Ratusan Warga Meriahkan Lomba Kerakyatan

SEKITAR 200 warga Pandeglang mengikuti berbagai lomba kerakyatan yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang. Kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat.

Peserta lomba berasal dari kader, pengurus, simpatisan Partai Demokrat serta masyarakat sekitar. Mereka berbaur mengikuti berbagai perlombaan, mulai dari balap karung, balap kelereng, makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol hingga lomba mewarnai untuk anak-anak.

Anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Bustomi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan HUT ke-25 Partai Demokrat. “Pesertanya dari kader, simpatisan, pengurus dan masyarakat sekitar,” kata Agus, Minggu (23/8).

Menurut Agus, sebelumnya DPC Partai Demokrat Pandeglang juga menggelar lomba pidato AHY Muda dan lomba baris-berbaris. Rangkaian kegiatan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. “Antusiasme masyarakat mengikuti lomba kerakyatan ini luar biasa. Turut serta dalam memeriahkan acara yang diselenggarakan oleh DPC Demokrat,” ujarnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, MM Fuhaira Amin, mengatakan kegiatan lomba terbuka bagi masyarakat umum. Peserta berasal dari sejumlah lingkungan, di antaranya Kampung Kumalirang, Kadubanen dan Pasirkalapa. “Sekaligus juga dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Terbuka untuk umum, jadi mulai dari kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat sekitar,” katanya.

Fuhaira mengatakan, kegiatan diawali dengan senam aerobik bersama warga. Setelah itu, peserta mengikuti berbagai perlombaan yang disiapkan panitia. “Pagi kita senam aerobik bersama warga sekitar, pemanasan berolahraga. Setelah itu lomba-lomba kerakyatan seperti lomba balap kelereng, balap makan kerupuk dan lain sebagainya,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap tahun. Biasanya, lomba digelar menjelang HUT Partai Demokrat pada 9 September. Namun, tahun ini pelaksanaannya disesuaikan dengan rangkaian agenda dari tingkat pusat. “Melaksanakan pada bulan Agustus, antusias masyarakat cukup luar biasa. Orang tua dan anak-anak itu kurang lebih 200 orang,” ujarnya.

Peserta lomba berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak tingkat taman kanak-kanak hingga orang dewasa. Untuk anak-anak, panitia menyediakan lomba mewarnai. Panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah dan doorprize bagi peserta. “Kita juga menyediakan doorprize yang bermanfaat buat ibu-ibu rumah tangga,” katanya.

Fuhaira berharap kegiatan tersebut dapat menjadi sarana mempererat persatuan dan solidaritas masyarakat. Menurutnya, peringatan kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan yang membangun kebersamaan dan kegembiraan. “Jadi kita sambut hari kemerdekaan dengan kegembiraan, kemeriahan, jangan saling salah-menyalahkan dan sebagainya. Kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Pandeglang, bagaimana kita bisa menceriakan dan membahagiakan lingkungan sekitar,” tuturnya.(DHE/PAY)

PANDEGLANG

SPAM DAK 2025 Tak Berfungsi

Warga Cisampih Tampung Air Selokan



Warga Kampung Cisampih, Iyan saat menampung air selokan yang kondisinya keruh untuk keperluan sehari-hari.

PANDEGLANG, BANPOS - Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 di Kampung Cisampih, Desa Pakuluruan, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, dikeluhkan warga. Pasalnya, fasilitas yang dibangun untuk menyediakan air bersih tersebut belum berfungsi dan tidak mengalirkan air ke rumah warga.

Kondisi itu membuat warga terpaksa memanfaatkan air selokan yang mengalir di sekitar area persawahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air yang digunakan warga tersebut dalam kondisi keruh dan hanya dimanfaatkan untuk mencuci.

Warga Kampung Cisampih, Iyan, mengatakan kondisi kekurangan air bersih telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan sejak musim kemarau. “Sudah tiga bulan lebih menampung air selokan, meskipun keruh terpaksa kita gunakan. Kondisi airnya keruh, tidak layak konsumsi, makanya hanya kita gunakan untuk mencuci saja. Dulu pernah digunakan untuk mandi, tapi setelahnya badan pada gatal,” kata Iyan kepada BANPOS beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi jika fasilitas SPAM yang dibangun pemerintah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terlebih, pembangunan fasilitas tersebut baru dilakukan

pada 2025. “Padahal bangunannya baru dibangun tahun 2025, tapi sudah tidak berfungsi. Saya dan warga lainnya cuma dapat meteran airnya saja. Sejak dipasang ke rumah sampai sekarang belum pernah dapat air bersih,” ujarnya.

Iyan berharap pemerintah segera memperbaiki fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan masyarakat. Menurutnya, persoalan kekurangan air bersih selalu terjadi setiap musim kemarau. “Setiap tahun kita mengalami kekurangan air bersih. Seharusnya ketika ada bangunan itu dapat membantu mendapatkan air bersih. Infonya anggarannya ratusan juta, tapi kalau kenyataannya seperti ini kan jadi mubazir,”

katanya.

Ia menilai pembangunan fasilitas pelayanan dasar harus dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama warga yang memang membutuhkan akses air bersih.

Terpisah, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Pandeglang, Lela, mengatakan program SPAM yang bersumber dari DAK 2025 tersebar di 13 desa. “Ada 13 paket yang didanai oleh DAK, tersebar di 13 desa,” kata Lela.

Menurutnya, program tersebut ditujukan untuk menyediakan akses air bersih melalui sambungan rumah bagi masyarakat. “Tujuannya adalah akses air bersih untuk sambungan rumah,” ujarnya.

Lela mengatakan seluruh pekerjaan SPAM tersebut dilaksanakan secara kontraktual dan telah selesai serta diserahterimakan kepada pemerintah daerah. “Iya kontraktual, sudah selesai. Alhamdulillah semua program yang kita laksanakan melalui kontraktual, semua memanfaatkan oleh masyarakat karena dasar usulan air bersih dari masyarakat,” jelasnya.

Namun, saat dimintai tanggapan mengenai fasilitas SPAM di Kampung Cisampih yang disebut warga tidak berfungsi dan belum mengalirkan air bersih sejak selesai dibangun, Lela belum memberikan penjelasan hingga berita ini ditulis.(DHE/PAY)

Jembatan Mekarsari Ambruk, Akses Warga Terputus

PANDEGLANG, BANPOS - Akses warga sejumlah perkampungan di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, terputus setelah jembatan beton sepanjang 25 meter ambruk, Minggu (23/8) sekitar pukul 06.00 WIB. Jembatan dengan lebar 2,5 meter tersebut ambruk saat dilintasi truk bermuatan pasir yang diduga melebihi tonase. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Ketua RT Desa Mekarsari, Ade Sarmani, mengatakan jembatan ambruk ketika truk membawa material pasir untuk pembangunan majelis taklim melintas. “Saat truk bermuatan bahan material pasir untuk keperluan pembangunan majelis taklim melintas, jembatan itu tiba-tiba ambruk,” kata Ade kepada wartawan, Senin (24/8).

Menurut Ade, jembatan tersebut dibangun pada 2017. Sebelum kejadian, kondisi jembatan masih dapat dilalui kendaraan meski sejumlah bagian telah mengalami kerusakan dan sempat ditambal menggunakan batang pohon kelapa.

“Kondisi jembatan sebelum truk muatan pasir melintas masih normal. Kendaraan melintas aman, sekalipun memang sudah tambal sulam pakai batang pohon kelapa,” ujarnya.

Ambruknya jembatan membuat akses menuju sejumlah perkampungan, termasuk Kampung Citoke dan Gendir, terputus. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas warga, mulai dari akses menuju sekolah dan pasar hingga pengangkutan hasil pertanian. “Otomatis untuk sementara lumpuh. Karena akses jalan menuju Kampung Citoke, Gendir, putus. Ya, semoga saja secepatnya pemerintah turun tangan melaksanakan perbaikan jembatan,” katanya.

Ade berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar akses masyarakat kembali normal. Terlebih, jembatan tersebut menjadi salah satu akses penting bagi aktivitas warga di sejumlah perkampungan.

Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Pandeglang, Andrian Wisudawan, mengatakan jembatan tersebut merupakan



Truk bermuatan material pasir saat melintas di jembatan yang ambruk.

kan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. “Terkait kewenangan ada di kabupaten. Perbaikan akan kita upayakan,” katanya.

Andrian menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, jembatan tersebut dibangun pada 2017 melalui program bantuan presiden (Banpres). Karena itu, proses perbaikannya perlu diawali dengan perencanaan teknis. “Berdasarkan info yang didapat, bangun-

an dibangun tahun 2017 lewat Banpres dan harus mulai dari perencanaan,” ujarnya.

Menurut Andrian, kebutuhan perbaikan untuk memperbaiki jembatan tersebut cukup besar. Dengan konstruksi sederhana, biaya perbaikan diperkirakan mencapai sekitar Rp2,2 miliar. “Dengan konstruksi sederhana, anggarannya sekitar Rp2,2 miliar. Saat ini kita inventarisasi dulu,” ungkapnya.(DHE/PAY)

Berkas Tiga Balon Ketua PWI Pandeglang Diserahkan ke PWI Banten



Ketua Panitia Konferensi PWI Kabupaten Pandeglang, Nipal Sutiana saat menyerahkan berkas kepada Sekjen PWI Provinsi Banten, Fahdi Khalid.

PANDEGLANG, BANPOS - Panitia Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pandeglang menyerahkan tiga berkas bakal calon (balon) Ketua PWI Pandeglang periode 2026-2029 kepada PWI Provinsi Banten, Selasa (25/8). Penyerahan dilakukan setelah proses pendaftaran bakal calon ditutup pada Selasa (25/8) pukul 00.00 WIB. Ketiga bakal calon tersebut yakni Ari Supriadi, Asep Mujahidin dan Yanadi.

Ketua Panitia Konferensi PWI Kabupaten Pandeglang, Nipal Sutiana, mengatakan seluruh berkas telah diserahkan kepada PWI

Banten untuk menjalani proses verifikasi dan penetapan calon. “Berkas para bakal calon itu kami serahkan ke PWI Provinsi Banten melalui Sekjen PWI Banten, Fahdi Khalid,” kata Nipal, Selasa (25/8).

Menurut Nipal, panitia konferensi telah melakukan verifikasi awal terhadap berkas yang disampaikan para bakal calon. Selanjutnya, proses verifikasi dan penetapan calon menjadi kewenangan tim verifikasi PWI Provinsi Banten. “Selanjutnya, kewenangan penetapan calon ada di tim verifikasi PWI Provinsi Banten,” ujarnya.

Dari tiga berkas yang diserahkan,

dua dinyatakan lengkap berdasarkan verifikasi panitia, yakni berkas Ari Supriadi dan Asep Mujahidin. Sementara berkas Yanadi diterima dengan catatan perbaikan karena masih terdapat sejumlah dokumen yang harus dilengkapi. Di antaranya pasfoto, surat keterangan bukan ASN maupun anggota TNI/Polri, pakta integritas serta sejumlah dokumen persyaratan lainnya. “Sudah diinformasikan sebelumnya, tapi sampai batas waktu penyerahan berkas yang ditentukan panitia, Yanadi tak kunjung melengkapi berkas yang dibutuhkan,” kata Nipal didampingi Sekre-

taris Panitia Konferensi PWI Kabupaten Pandeglang, Samsul Fatoni.

Nipal menegaskan, status kelengkapan berkas tersebut merupakan hasil verifikasi awal panitia. Penentuan akhir mengenai kelengkapan masing-masing bakal calon berada di tangan tim verifikasi PWI Provinsi Banten.

Sekretaris Jenderal PWI Provinsi Banten, Fahdi Khalid, membenarkan pihaknya telah menerima seluruh berkas pencalonan yang disampaikan Panitia Konferensi PWI Kabupaten Pandeglang. “Selanjutnya, berkas itu akan diverifikasi oleh tim PWI Provinsi Banten,” katanya.(DHE/PAY)

IKLAN LARIS

Info Iklan:
- 051334404392
- 057505531153

KEHILANGAN

Telah hilang Surat AJB atas nama SUNARNI Nomor : 470/2005 Lokasi Kelurahan Pakojan Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Telah hilang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5379 atas nama Tasmin Bin Pian, dengan luas tanah 244 m². Lokasi tanah di Jl. Poncol Indah Raya No. 9 RT 05/02, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,

Provinsi Banten.

HILANG BPKB, R4
NO. POL: A-257-K
NOKA: MHKF MR CEJ4K 001140
AN. PEMERINTAH DAERAH

HILANG BPKB, R4
NO POL: A-1473-KR
HOKA: MHKM1CB4JEK 036217
AN. H. SUKRI BIN SUWARTA (ALM).

HILANG BPKB, R4
NO.POL: A-9236-KB

HOKA: MHMF E 74 P5JK 184005
AN. Mahajana Cahaya Juwita

Tlh hilang 1 Unit BPKB Nopol A 1293 HL Merk Suzuki Thn 2003, No KA MHYESJ4103J095201, No Sin F10SID197771

Tlh hilang 1 unit BPKB Nopol A 1053 EA, Merk Toyota, No KA MHKE8FB3JKJ000397, No Sin 2NRF890966 Th 2019 No. BPKB P05549215H1

Tlh hilang 1 Unit BPKB Nopol B 4228 BVS Merk Yamaha Thn 2019 No Ka MH3SG4640KJ058554 No sin G3J8E0111887

Telah Hilang Sertifikat HGB no. 280301119.3.00602, Ds. Jatimulya, Rangkasbitung, L. 3080 M2. An. PT Makmur Multy Mega Mandiri

Telah Hilang BPKP Mobil Suzuki Pick Up, Warna Hitam, No. Mesin: G15AID1094223, No. Rangka: MHYESL415HJ803622, No. Pol. B

9571 CAH, No. BPKP: N05408218. Tahun 2017, atas nama NURUDIN, Alamat: Batucapeper RT.02/03 Batucapeper Kota Tangerang

Telah hilang sertifikat sebidang tanah Hak Milik SHM No 71 (28050404100071) dengan Luas 5.590 m², jalan dumpit raya, kelurahan Gandasari kecamatan jatuwung atas nama Tjapang.

MAKANAN

Jual/menerima pesanan Bubur Ayam Cianjur dan Lontong Sayur. alamat: Lampu merah Perumahan Graha Asri, Ciracas, Kota Serang - Banten Hub: Jejen 0878 7346 4053



Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, TB Agus Khotibul Umam saat memimpin rapat paripurna.

DPRD Pandeglang Bentuk Pansus Bahas 3 Raperda



Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, TB Agus Khotibul Umam saat menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS 2027.



Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani saat menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS 2027.

PANDEGLANG, BANPOS- DPRD Kabupaten Pandeglang, membentuk 3 Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas 3 Rencana Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi, Raperda Perizinan Berusaha Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Hasil pembentukan 3 Pansus tersebut, sebagai Ketua Pansus III, Dodi Setiawan, membahas Raperda sistem pemerintah daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi. Ketua Pansus IV, Miftah Farid Sukur membahas Raperda Perizinan Berusaha Daerah. Ketua Pansus V, Yangto membahas Raperda Pengelolaan BMD.(*)



Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik saat membacakan SK Pembentukan Pansus.



Ketua Pansus III, Dodi Setiawan saat memimpin rapat membahas Raperda sistem pemerintah daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi.



Ketua Pansus IV, Miftah Farid Sukur saat memimpin rapat membahas Raperda Perizinan Berusaha Daerah.



Pansus III, saat rapat membahas Raperda sistem pemerintah daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi.



BANPOS CHANNEL



WWW.BANPOS.CO



BANTENPOS@GMAIL.COM



BANTEN_POS



BANTEN POS



Warga mekarsari antusias mengantri bantuan, Senin (24/8).

1.408 KK di Mekarsari Terima Bansos Beras

CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, menyalurkan bantuan sosial berupa beras kepada 1.408 kepala keluarga (KK). Bantuan yang merupakan program pemerintah pusat tersebut diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026.

Lurah Mekarsari, Fantoni, mengatakan setiap penerima manfaat memperoleh bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk tiga bulan. “Bantuan beras selama tiga bulan dengan penerima manfaat 1.408 orang. Per orang mendapatkan 30 kilogram,” katanya.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap mulai Kamis hingga Senin. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatur antrian sekaligus mencegah terjadinya penumpukan warga saat pengambilan bantuan. “Bantuan ini dari program pemerintah pusat yang sedang kami salurkan dari hari Kamis sampai Senin. Kami jadwalkan agar tidak berdesakan,” ujarnya.

Fantoni menjelaskan, bantuan yang disalurkan pada periode kali ini berupa beras. Sementara pada penyaluran sebelumnya, bantuan pangan juga pernah disertai minyak. “Yang kami salurkan dari pemerintah pusat berupa beras sebanyak 30 kilogram untuk bantuan sosial bulan Juli, Agustus, dan September kepada 1.408 kepala keluarga,” katanya.

Menurutnya, program ban-

tuan sosial tersebut telah berjalan setiap tahun. Namun, jumlah bantuan yang disalurkan pada 2026 menjadi salah satu yang terbesar. Penyaluran kali ini juga telah memasuki tahap ketiga. “Sudah setiap tahun berjalan, tetapi yang terbesar di tahun 2026. Saat ini sudah yang ketiga kalinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Warga dinilai terbantu karena bantuan pangan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepuhuhnya pulih. “Masyarakat sudah bersyukur dan banyak berterima kasih kepada pemerintah. Dengan kondisi ekonomi saat ini, bantuan ini sangat membantu,” katanya.

Pemerintah Kelurahan Mekarsari turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Cilegon dan pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat melalui program bantuan sosial tersebut. “Kami dari pemerintah kelurahan berterima kasih kepada Pemerintah Kota Cilegon dan pemerintah pusat yang telah peduli kepada masyarakat, khususnya masyarakat Mekarsari,” tuturnya.

Kelurahan Mekarsari berharap program bantuan pangan tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Bantuan dinilai masih diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga. (CR03/PAY)

Bank Sampah Barokah Dukung Maulid Nabi di Julalen

CILEGON, BANPOS - Bank Sampah Barokah menyerahkan bantuan Rp7 juta kepada Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Lingkungan Kapudenok Julalen, Kota Cilegon. Bantuan diserahkan Ketua Bank Sampah Barokah, Luki Budi Permana, kepada Ketua Panitia Maulid Nabi, Heru Budi Saputra, dalam rapat persiapan kegiatan di Masjid Jamiul Barokah, Lingkungan Julalen, Sabtu (22/8/2026).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dijadwalkan berlangsung di Masjid Jamiul Barokah pada Selasa (25/8). Luki mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan Bank Sampah Barokah terhadap kegiatan keagamaan sekaligus upaya memperkuat kebersamaan masyarakat.

Menurut Luki, peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk mempererat silaturahmi dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. “Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya kepada BANPOS, Senin (24/8).

Sementara itu, Heru Budi Saputra menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, dukungan tersebut membantu panitia memenuhi kebutuhan dalam persiapan kegiatan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Luki Budi Permana selaku Ketua Bank Sampah Barokah atas bantuan dan

perhatian yang diberikan kepada panitia. Bantuan ini tentu sangat berarti dan akan membantu kami dalam mempersiapkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW,” kata Heru.

Ia berharap dukungan dari berbagai pihak terus diberikan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Menurutnya, semangat gotong royong masyarakat menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan kegiatan.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jamiul Barokah, Ustaz Maftuhi, juga menyambut baik pelaksanaan Maulid Nabi di masjid tersebut. Ia mengatakan, Masjid Jamiul Barokah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan mempererat silaturahmi. “Kami selaku pengurus DKM Masjid Jamiul Barokah tentu menyambut baik dan mendukung pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid ini,” ujarnya.

Maftuhi berharap seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Lingkungan Kapudenok Julalen. “Yang terpenting, melalui peringatan Maulid Nabi ini, masyarakat dapat semakin memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW dan meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Penyerahan bantuan tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dukungan berbagai pihak diharapkan dapat memperlancar kegiatan sekaligus memperkuat silaturahmi dan semangat gotong royong masyarakat. (BAR/PAY)

Perkim Perketat Pemeriksaan Kesehatan Pohon

CILEGON, BANPOS - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Cilegon meningkatkan pemeriksaan kesehatan pohon di sejumlah ruang terbuka hijau (RTH). Langkah tersebut dilakukan setelah salah satu pohon di Taman Layak Anak tumbang akibat mengalami pembusukan pada bagian akar.

Fungsional Penata Kelola Perumahan Perkim Kota Cilegon, Wendi Arthiyanto, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan pohon sekaligus mengantisipasi risiko dahan patah maupun pohon tumbang. “Memang kemarin itu sempat ada pohon rubuh di Taman Anak. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada akar yang busuk,” ujar Wendi, Senin (25/8).

Dari pemeriksaan awal, kata Wendi, ditemukan sejumlah pohon dengan kondisi kurang sehat. Di kawasan Taman Layak Anak, terdapat satu pohon yang mengalami kondisi sakit cukup parah dan dua hingga tiga pohon lainnya memiliki pertumbuhan tidak simetris. “Kalau di dalam area itu yang sakit parah ada satu, yang kondisinya tidak simetris ada dua

atau tiga pohon,” katanya.

Wendi menjelaskan, selama ini pemangkasan pohon lebih banyak dilakukan untuk kepentingan penataan. Ke depan, pemangkasan akan disertai pemeriksaan kesehatan pohon agar penanganan dapat dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing pohon. “Selama ini kami hanya sebatas pemangkasan, cuma belum ke substansi apakah pohon itu sehat atau enggak. Ke depannya akan terkait kesehatan pohon,” ujarnya.

Pemeriksaan dan pemangkasan akan dilakukan secara berkala. Perkim akan memulai langkah tersebut dari Taman Layak Anak sebelum dilanjutkan ke sejumlah taman lainnya di Kota Cilegon. “Mungkin kami akan mulai dari Taman Layak Anak dan akan berlanjut ke taman lain,” tuturnya.

Sementara itu, arborist Hadi Kurniawan turut melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan edukasi kepada jajaran Perkim mengenai mitigasi risiko pohon. Menurutnya, pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengidentifikasi pohon yang sakit atau berpotensi membahayakan warga. “Saya mencoba komunikasi dengan pihak Dinas Perkim Kota Cilegon untuk

berbagi pengetahuan, supaya ada kepedulian dulu mana saja pohon yang sakit, pohon berbahaya, sehingga pada saat pohon tumbang ataupun patah bisa diminimalisir. Mitigasi dari awal,” kata Hadi.

Berdasarkan pemeriksaan awal, Hadi menemukan satu pohon dalam kondisi sakit berat dan berpotensi roboh apabila tidak segera mendapat penanganan khusus. “Di sini juga ada salah satu pohon yang statusnya sudah sakit berat, itu berpeluang untuk roboh kapan saja,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai sebagian besar pohon di kawasan tersebut masih dapat dipertahankan melalui perawatan. Penanganan dapat dilakukan dengan pemangkasan, pengurangan tajuk, serta pemeriksaan kesehatan lanjutan. “Secara keseluruhan masih bisa dipertahankan dengan cara perlakuan khusus. Harus ada pemangkasan, harus ada pengurangan tajuk, harus ada pemeriksaan kesehatan lanjutan,” katanya.

Hadi juga mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar tidak menganggap penanaman pohon sebagai tahap akhir pengelolaan RTH. Pohon perlu

mendapatkan perawatan secara berkala untuk menjaga kesehatan sekaligus keselamatan warga. “Ruang terbuka hijau ini tidak hanya setelah ditanam selesai, tapi juga perlu dipelihara, ada perawatannya, harus ada maintenance,” tegasnya.

Selain faktor usia dan kondisi alam, Hadi menyoroti tindakan vandalisme terhadap pohon, seperti memaku batang serta membakar pohon. Pemasangan spanduk dan banner pada batang pohon juga dinilai dapat mengganggu pertumbuhan dalam jangka panjang. “Biasanya di jalan-jalan utama itu bekas pemasangan spanduk, banner kampanye terdahulu sangat memengaruhi pertumbuhan pohon. Meskipun dalam jangka waktu dekat tidak berpengaruh, tapi dalam jangka lama akan menjadi infeksi pada pohon tersebut dan bisa menjadi pintu masuk serangan hama,” jelasnya.

Menurut Hadi, pemeriksaan dan pemeliharaan pohon secara berkala penting dilakukan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang aman sekaligus menjaga keberadaan RTH di Kota Cilegon. (CR03/PAY)

Perbasi Cilegon Dorong Standardisasi Lapangan Basket

CILEGON, BANPOS - Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Cilegon periode baru mendorong pemerintah tidak hanya merevitalisasi lapangan basket secara fisik, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut memenuhi standar olahraga.

Ketua Perbasi Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, mengatakan Perbasi perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan revitalisasi lapangan agar spesifikasi fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan olahraga bola basket. “Di sinilah peran Perbasi, bahwa kita dilibatkan dalam standardisasi lapangan basket Kota Cilegon sesuai standardisasi, supaya anggaran ini tepat sasaran untuk olahraga,” ujar Rizki usai pelantikan Pengurus Perbasi Kota Cilegon di Aula DPRD Cilegon, Senin (24/8).

Menurut Rizki, Perbasi telah melakukan survei terhadap sejumlah lapangan basket yang berada di kawasan alun-alun kecamatan. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tiga lapangan diarahkan untuk direvitalisasi, sedangkan satu lokasi di Seruni diusulkan untuk



Pelantikan Pengurus Perbasi Kota Cilegon Periode 2026-2030, Senin (24/8)

pembangunan lapangan baru.

Ia mengatakan, revitalisasi perlu memperhatikan aspek teknis, termasuk marka dan standar lapangan. Pembinaan fasilitas diharapkan tidak sekadar memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga menunjang pem-

binaan atlet dan penyelenggaraan pertandingan. “Lapangan yang ada ini perlu ada standardisasi. Terutama olahraga, fasilitas sarana dan prasarana lapangan basket yang harus dilakukan revitalisasi,” tuturnya.

Serikat Karyawan Latinusa Salurkan Air Bersih ke Gunung Batur

CILEGON, BANPOS - Bantuan air bersih kembali disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di

Lingkungun Gunung Batur 1 dan Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Kali ini, bantuan datang dari Serikat Karyawan Latinusa (Skala) melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cilegon. Sebanyak dua tangki air dikirim untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Perwakilan Skala, Rahmatullah, mengatakan pihaknya mendapat informasi mengenai kondisi kekeringan di Gunung Batur dari Baznas Kota Cilegon. Informasi tersebut kemudian mendorong Serikat Karyawan ikut membantu warga terdampak. “Terima kasih kepada Baznas Kota Cilegon yang selalu memberikan informasi mengenai kondisi masyarakat. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk berbagi kepada saudara-saudara kami yang saat ini kekeringan dan kekurangan air ber-

sih,” ujar Rahmatullah.

Ia mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Serikat Karyawan sebagai bagian dari masyarakat Kota Cilegon. Bantuan air bersih diharapkan dapat meringankan beban warga selama sumber air mengalami keterbatasan. “Kami sebagai masyarakat Kota Cilegon juga mewakili rekan-rekan anggota serikat karyawan bisa memberikan air bersih,” katanya.

Menurut Rahmatullah, kegiatan sosial tersebut telah menjadi komitmen Serikat Karyawan untuk membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. “Kaitan bantuan ini memang sudah menjadi komitmen kami. Selagi bisa dan mampu, mudah-mudahan berkah kepada kami,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II Baznas Kota Cilegon, Habibi, mengatakan pihaknya telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak kekeringan. “Kami berkolaborasi dua tangki bantuan air ke Gunung Batur I dan II. Bantuan sangat bermanfaat.

Kalau Baznas, dari dua bulan lalu hampir terus mengirimkan air tiap minggu,” katanya.

Lurah Mekarsari, Fatoni, mengatakan penyaluran air tersebut sangat membantu warga Gunung Batur 1 dan Gunung Batur 2. Menurutnya, kebutuhan air warga tidak hanya untuk mandi dan mencuci, tetapi juga untuk memasak. “Pengiriman hari ini dari pagi sebanyak 8.000 liter di Gunung Batur. Saat ini dari serikat dua tangki, satu tangkinya lima ribu liter,” ujarnya.

Selain air bersih, kata Fatoni, warga juga mendapatkan bantuan air mineral dari komunitas. Bantuan kebutuhan pokok dan sembako dari Dinas Sosial juga sebelumnya telah diberikan kepada masyarakat. “Masyarakat yang ada di atas selain kebutuhan air untuk nyuci dan masak, ada komunitas mengirim air mineral ke masyarakat. Selain daripada air juga ada yang lain bisa membantu. Kemarin Dinsos juga memberikan paket dan sembako-sembako,” katanya.

Fatoni berharap distribusi air

bersih dapat terus dilakukan selama warga masih mengalami kekurangan air. Namun, ia menilai bantuan tangki air hanya menjadi solusi sementara. Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah perlu membangun infrastruktur penyediaan air, seperti jaringan perpipaan dan tandon, agar kebutuhan air masyarakat di kawasan pegunungan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. “Harapan kami jangka panjang, mulai dari pipanisasi dan tandon juga mulai dibuat. Saat ini pelaksanaan mulai dari Ciporong, akhir 2026 insyaallah bisa selesai dan 2027 itu harapan kami,” tuturnya.

Fatoni juga berharap perusahaan industri di sekitar Kota Cilegon turut berkontribusi membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. “Harapan kami untuk industri, mudah-mudahan akan ada kepedulian. Di depan mata, industri belum ada tanda-tanda memberikan bantuan dan belum kelihatan kepeduliannya,” katanya. (CR03/PAY)





DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN SERANG



Demokrat Kabupaten Serang Sapa Warga di HUT ke-25

PERINGATAN ulang tahun ke-25 partai berlambang mercy ini dirayakan secara sangat meriah di warga Kabupaten Serang. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Serang berinisiatif menginisiasi sebuah acara besar. Mereka secara aklamasi sepakat memastikan Demokrat gelar lomba rakyat di area pedesaan.

Ratusan warga Desa Krapcak, Kecamatan Kramatwatu, terlihat amat sangat antusias dalam menghadiri perayaan ini. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Serang, Azwar Anas, turut hadir meninjau lokasi kegiatan secara langsung. Pimpinan partai tersebut langsung memberi penjelasan komprehensif terkait tujuan penyelenggaraan.

"Nah, jadi HUT ini diselenggarakan memang harus posisinya di tengah-tengah masyarakat," kata Anas.

Menurut Azwar, perayaan ini memang sengaja dipusatkan secara merata tepat di daerah pelosok. Langkah taktis strategis ini diambil demi terus menjaga kedekatan kader dengan masyarakat. Ia kembali menegaskan bahwa silaturahmi politik wajib menyentuh seluruh lapisan akar rumput.

Sosok tersebut sangat berharap warga bisa mengenal partainya dengan lebih dekat lagi. Masa kejayaan partai pada dua dekade



Demokrat Gelar Lomba Rakyat

menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis. Aneka ragam jajanan dari pelaku UMKM setempat juga diizinkan meramaikan suasana perayaan tersebut. Pemuda bernama Rajib tampak antusias mengikuti lomba hari itu.

"Seneng, meriah, seru lagi acaranya," ujar Rajib.

Rajib sendiri menilai ajang perlombaan ini memberikan dampak positif bagi pemuda desanya. Kegiatan sosial semacam ini dinilai jauh lebih bermanfaat bagi tumbuh kembang mereka. Para pemuda kini memiliki opsi hiburan sehat selain menatap layar gawai.

Berbagai interaksi langsung di lapangan sukses mempererat nilai solidaritas antar warga desa. Para kader partai pun perlahan semakin mendalami dinamika sosial masyarakat pelosok. Sinergi kuat ini diharapkan terus terjalin erat hingga tahun berikutnya.

"Seru jadi main bareng ama temen-temen nggak main HP terus," kata Rajib. (*)

lampau menjadi motivasi pergerakan kader. Mereka menargetkan kebangkitan kekuatan politik yang masif pada pemilihan mendatang. "Dan insyaAllah ke depan,

mohon doa dan dukungannya agar Partai Demokrat kembali berjaya kembali," pungkas Anas.

Rangkaian acara tersebut tentu tidak sekadar berfokus penuh pada pidato orasi politik. Panitia juga

terpantau sukses menggelar aneka kompetisi seperti balap karung. Ada pula lomba mengaitkan kawat serta peragaan busana yang memancing gelak tawa. Selain perlombaan, panitia sigap





Pemprov Tegaskan Pelayanan Kesehatan Jangan Ada Diskriminasi

SERANG, BANPOS - Pemprov Banten menekankan tentang pentingnya pelayanan kesehatan yang adil dan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan, saat menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, Senin (24/8).

Pada kesempatan tersebut, Deden mengingatkan kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes) baik di RSUD Banten maupun di Rumah Sakit lain agar memberikan pelayanan yang ramah serta tidak membedakan pasien berdasarkan latar belakang ekonomi maupun status kepesertaan fasilitas kesehatan.

“Ya, sebetulnya tadi yang saya sampaikan itu bahwa nakes itu harus senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Ya, di antaranya kan tidak ada perbedaan. Karena orang sakit itu sebetulnya nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada BPJS nggak ada yang umum, tapi ya kalau sakit ya sakit, semua harus dilayani dengan maksimal,” tegas Deden.

Selain menyoroti sikap nakes, Deden juga mendorong RSUD Banten untuk lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat luas. Menurutnya, tanggapan negatif dari publik merupakan bahan evaluasi berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Jangan khawatir kita mendapatkan tanggapan yang negatif, karena justru di situlah suplemen kita. Ketika kita mendapatkan ketidakpuasan, berarti kita tahu apa yang diperbaiki. Nah, makanya agar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Banten ini juga optimal dan menuju maksimal, ya kita harus bisa menerima masukan-masukan dari masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Umum (Dirut) RSUD Banten Danang Hamsah Nugroho mengatakan

pihaknya akan memperluas keterlibatan masyarakat dalam forum konsultasi publik. Namun, menurut dia, komunikasi dengan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui forum yang digelar setiap tahun tersebut.

“Kita akan laksanakan forum konsultasi publik yang melibatkan lebih banyak masyarakat, meskipun ikatan hubungan komunikasi dan jalinan kita komunikasi dengan masyarakat bukan di forum konsultasi saja,” kata Danang.

Menurut Danang, RSUD Banten telah menyediakan sejumlah kanal komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan masukan sepanjang tahun. Kanal tersebut antara lain situs web, media sosial seperti Instagram dan Facebook, layanan pengaduan, Google Review, survei kepuasan, serta layanan e-complaint.

“Pokoknya kita buat agar semua orang bisa berinteraksi dengan kami secara terus-menerus. Dalam satu tahun pelayanan kita itu bisa langsung berkomunikasi,” ujarnya.

Danang mengatakan setiap masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan bagian pelayanan yang perlu diperbaiki. Evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan berdasarkan masukan yang muncul dalam forum konsultasi publik.

“Kita akan melakukan sesuai dengan masukan yang ada, apakah kita perlu perbaikan, sisi detail mana yang harus diperbaiki. Tidak hanya di forum ini saja, tapi seluruh layanan yang sudah kita lakukan secara terus-menerus,” kata Danang.

Ia menilai masukan masyarakat turut berperan dalam perkembangan pelayanan RSUD Banten. Menurut dia, perbaikan pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari komunikasi yang dibangun dengan masyarakat.

“Kita tidak akan seperti saat ini kalau tidak ada masukan dari masyarakat,” ujar Danang.(MPD/AZM)



SERANG

Pemkot Tegur Citra Gading Pengembang Segera Dipanggil



SERANG, BANPOS - Pemkot Serang bersiap menindak tegas pihak pengelola properti yang lalai. Pengembang perumahan Citra Gading segera dipanggil terkait aset fasilitas umum kawasan.

Pemanggilan ini dipicu temuan lapangan Walikota Serang Budi Rustandi. Terdapat sejumlah ruas jalan yang urung diserahkan kepada pemerintah. Aset jalan strategis tersebut sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab perusahaan.

“DPKP Kota Serang akan memanggil perusahaan tersebut, karena pertama belum diserahkan. Yang kedua, kita akan memanggil mereka untuk membangun,” ujar

Budi.

Tinjauan lapangan itu berlangsung di wilayah Kelurahan Cipocok Jaya pada Senin (24/8). Pemerintah menolak keras adanya fasilitas layanan yang sengaja dibiarkan terbengkalai. Budi ingin memastikan infrastruktur kawasan bisa segera ditangani hingga tuntas.

Pada saat bersamaan, proyek betonisasi jalan perumahan ini terus dikebut. Pembangunan tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui instruksi khusus. Program ini diharapkan menyelesaikan krisis akses jalan di area permukiman.

“Sesuai dengan instruksi Pak

Gubernur Pak Andra Soni, hari ini kita melihat program Jalan Bang Andra, jalan di Perumahan Citra Gading,” katanya.

Progres pengerjaan beton dilaporkan telah mencapai separuh dari target utama. Volume jalan yang sedang dibangun membentang sepanjang 870 meter. Lebar lintasan pada proyek vital tersebut mencapai kurang lebih enam meter.

Selain intervensi provinsi, pemerintah kota rupanya turut menyiapkan langkah lanjutan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditugaskan memoles sisa perbaikan. Instansi ini akan mem-

bangun ruas jalan yang belum tersentuh pembeutan.

“Insyallah sisanya 200 meter akan dilanjutkan oleh DPKP sekitar 200 meter agar tuntas jalannya,” kata Budi.

Kepala DPKP Kota Serang M. Ibra Gholibi membenarkan rencana perbaikan tersebut. Instansinya telah memetakan penanganan infrastruktur pada tahun anggaran ini. Pembangunan dipastikan akan merata ke sejumlah area permukiman mendesak.

Total investasi daerah untuk pembenahan berbagai fasilitas ini terbilang besar. Dana sekitar Rp4 miliar telah disiapkan melalui skema perubahan anggaran. Pekerjaan itu mencakup pembeutan jalan raya serta perbaikan saluran drainase.

“Kurang lebih ada enam sampai tujuh titik ya, termasuk dengan jalan KSB kemarin,” ujar Ibra.

Titik perbaikan tersebut tersebar di sejumlah area permukiman padat. Lokasi sasarannya meliputi Puri Anggrek, Serang Hijau, Kelapa Gading, dan Persada Banten. Keterbatasan dana memaksa dinas teknis melakukan seleksi cermat.

Penentuan area sasaran pembangunan wajib didasarkan pada perhitungan yang objektif. Intensitas aktivitas masyarakat setempat sangat mempengaruhi keputusan akhir perbaikan. Kawasan dengan tingkat kerusakan berat otomatis menempati daftar prioritas.

“Ya kita skala prioritas, ya ini memang yang sudah mendesak. Kondisi lalu lintas harian sudah padat dan kondisi jalannya sudah hancur,” ujarnya.(CR02/AZM)

PWNU Banten Berangkat Menuju Mukhtamar

SERANG, BANPOS - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten meminta doa dan dukungan masyarakat Banten untuk kelancaran rombongan yang akan menghadiri Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris PWNU Banten, Ahmad Nuri, usai pelepasan rombongan PWNU Banten oleh Gubernur Banten Andra Soni di Pendopo Gubernur Banten.

Nuri menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Banten yang telah memberikan perhatian dan dukungan sekaligus melepas secara langsung keberangkatan rombongan PWNU Banten menuju lokasi Mukhtamar.

“Atas nama PWNU Banten, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Banten atas perhatian dan dukungan kepada rombongan kami. Insyaallah kami akan mengikuti Mukhtamar ke-35 dengan penuh tanggung jawab serta membawa semangat dan aspirasi warga Nahdliyin Banten,” ujar Ahmad Nuri kepala awak media, Selasa (25/8).

Menurutnya, keikutsertaan PWNU Banten dalam Mukhtamar NU ke-35 merupakan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal serta mempererat hubungan antarpengurus NU dari berbagai daerah.

Mukhtamar, kata dia, menjadi ruang bagi para pengurus untuk bertukar pandangan, memperkuat koordinasi, sekaligus membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkembangan organisasi dan kehidupan masyarakat.

“Keikutsertaan kami dalam Mukhtamar ini tentu menjadi momentum untuk memperkuat kon-



solidasi organisasi. Di sana kami juga dapat mempererat silaturahmi dengan pengurus dan warga Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai daerah,” katanya.

Nuri berharap seluruh peserta asal Banten dapat mengikuti setiap rangkaian Mukhtamar dengan baik dan penuh tanggung jawab. Para peserta juga diharapkan mampu membawa serta menyuarakan aspirasi warga Nahdliyin Banten dalam forum tersebut.

Menurutnya, keberadaan delegasi Banten di Mukhtamar harus dapat memberikan kontribusi bagi pembahasan arah organisasi ke depan.

“Kami memohon doa dan dukungan masyarakat Banten agar perjalanan tiga bus rombongan PWNU Banten menuju Tambakberas, Jombang, diberikan keselamatan dan kelancaran,” ucapnya.

Selain kelancaran perjalanan, PWNU Banten juga berharap Mukhtamar NU ke-35 mampu menghasilkan keputusan strategis yang dapat memperkuat peran NU dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

“Kami juga berharap Mukhtamar menghasilkan keputusan yang mampu memperkuat khidmat NU kepada umat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni berpesan kepada seluruh rombongan PWNU Banten agar menjaga kekompakan, persaudaraan, kesehatan, serta nama baik Banten selama mengikuti seluruh rangkaian Mukhtamar.

Pesan tersebut disampaikan karena para peserta tidak hanya membawa nama organisasi, tetapi juga menjadi representasi Banten dalam forum nasional yang dihadiri

pengurus NU dari berbagai wilayah Indonesia.

“Bawa nama baik Banten. Jaga kekompakan, persaudaraan, dan kesehatan. Semoga seluruh rangkaian Mukhtamar berjalan lancar serta menghasilkan keputusan yang membawa kemakhlahan bagi umat dan masyarakat,” ujar Andra.

Andra juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan tertib dan menjaga hubungan baik dengan seluruh peserta Mukhtamar dari berbagai daerah.

Usai pelepasan, tiga bus rombongan PWNU Banten kemudian bertolak menuju Tambakberas, Jombang. Rombongan dijadwalkan mengikuti Mukhtamar NU ke-35 yang berlangsung pada 27 hingga 30 Agustus 2026 di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.(CR02/AZM)

Pemkab Wujudkan SDM Unggul Lewat Pendidikan Berkualitas



Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas (keenam dari kiri) saat foto bersama usai Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) unit pendikan di Serang, Banten.

SERANG, BANPOS - Pemkab Serang, Provinsi Banten, terus berupaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui dorongan terhadap terciptanya lembaga pendidikan yang berkualitas di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, melalui keterangannya di Serang, Senin, menyatakan salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan terus meningkatkan kompetensi para pimpinan dan pengurus yayasan pendidikan.

“Pendidikan yang unggul lahir dari sumber daya manusia penge-

lola nya yang juga memiliki kualitas unggul,” kata Najib.

Menurut Najib, Pemkab Serang memandang pengelolaan lembaga pendidikan tidak hanya bertumpu pada kelengkapan sarana dan program yang baik. Lebih dari itu, dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya secara profesional dan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam langkah perwujudan SDM unggul itu, Pemkab Serang turut mengapresiasi kiprah Yayasan Pendidikan Al Izzah yang telah

32 tahun menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas di Banten, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah menengah, hingga pondok pesantren.

Sementara itu, Ketua Yayasan Al Izzah Muhammad Arifin, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab Serang serta arahan dari Wabup Najib Hamas yang dinilai telah ikut mengawal pengembangan yayasan sejak berdiri pada 1992.

Arifin mengatakan, kehadiran dan pengalaman yang dibagikan oleh perwakilan Pemkab Serang tersebut menjadi penyemangat

bagi jajaran pimpinan yayasan untuk terus berbenah.

“Kami berharap motivasi ini menjadi semangat bagi seluruh jajaran untuk membawa Yayasan Al Izzah menjadi lebih baik dalam melahirkan generasi unggul di masa depan,” ujarnya.

Guna meningkatkan mutu pendidikan Yayasan Al Izzah juga turut menggelar Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) yang diikuti oleh 120 peserta yang merupakan perwakilan pimpinan dari setiap unit pendidikan di lingkungan yayasan tersebut.(ANT/AZM)

Provinsi Didesak...

Sambungan dari Halaman 1

Menanggapi krisis yang terjadi, Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Yere-mia Mendrofa, mendesak Peme-rintah Provinsi Banten untuk segera mengambil langkah nyata dan terencana. Ia menekankan, pentingnya penanganan yang mencakup jangka pendek maupun jangka panjang agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban bencana kekeringan.

“Pemprov Banten harus segera mengambil langkah nyata dan te-rencana, baik jangka pendek mau-pun panjang, agar masyarakat ti-dak terus menjadi korban. Mitigasi yang baik hari ini adalah investasi untuk melindungi masyarakat Banten di masa depan,” tegas Ye-remia, Selasa (25/8).

Untuk penanganan jangka pen-dek, Yeremia mendorong peme-rintah daerah agar segera mendis-tribusikan air bersih ke wilayah-wilayah terdampak dan menya-lurkan bantuan darurat bagi warga serta para petani.

Selain itu, ia juga meminta op-timalisasi pemanfaatan embung,

Serapan Bankeu...

Sambungan dari Halaman 1

”Secara agregasi se-Provinsi Banten baru 38 persen. Ini masuk triwulan III jadi kita masih deg-de-gan,” kata Gunawan, Senin (24/8).

Bantuan keuangan desa yang dimaksud merupakan program Pemerintah Provinsi Banten de-ngan nilai Rp120 juta untuk setiap desa. Gunawan mengatakan ren-dahnya pencairan tidak hanya ber-kaitan dengan pelaksanaan pro-gram, tetapi juga kesiapan admini-strasi pemerintah desa.

Ia mengatakan pemerintah desa harus mengelola dua jenis anggar-an yang turun pada tahun yang sama, yakni dana desa dan alokasi dana desa. Kondisi itu, menurut dia, membuat sebagian pemerin-tah desa belum optimal menyele-saikan administrasi pertanggung-jawaban.

Selain itu, sejumlah desa masih memiliki SPJ tahun sebelumnya yang belum diselesaikan. Kondisi tersebut membuat pengajuan pencairan berikutnya terkendala karena sistem akan menolak pro-posal apabila pertanggungjawab-an anggaran sebelumnya belum dipenuhi.

”Sekarang ini keterlambatan itu karena kepala desa tidak memfo-kuskan terhadap pertanggungja-waban SPJ. Jadi kalau mereka banyak yang mengirim ke kita, sis-tem nolak karena proposal masuk ke kita tapi SPJ tahun sebelumnya belum masuk,” kata Gunawan.

DPMD Banten mendorong pe-merintah kabupaten, kecamatan, dan desa memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian administrasi. Gunawan meminta camat berperan aktif mengawasi perkembangan pelaksanaan pro-gram desa di wilayah masing-masing.

Menurut dia, camat perlu melaku-kan rapat mingguan dengan kepala desa serta mengevaluasi kendala yang menghambat pen-cairan dan pelaksanaan program. Pemerintah desa juga diminta tidak segan berkonsultasi dengan

Vox Populi...

Sambungan dari Halaman 1

dia yang mengurus para bawahannya yang kompeten itu.

Suatu ketika, penguasa daerah tersebut memberikan titah kepada para pejabatnya: diseminasikan kepada masyarakat luas capaian-capaian kinerja kita dan layanan yang dapat mereka akses. Masya-rakat berhak mengetahui apa yang kita kerjakan, karena semua ini berasal dari uang pajak mereka.

Mendengar titah tersebut, sang pejabat pun bergerak cepat. Ia me-merintahkan bawahannya untuk membuat konsep terbaik, dalam melakukan diseminasi informasi atas capaian kinerja mereka.

”Jadi pak, kita buat publikasi di media sosial setiap harinya yang berisikan informasi berulang se-perti kapan layanan keliling dilak-sanakan, apa syarat-syarat untuk mengurus dokumen. Nanti ada juga waktu-waktu tertentu untuk memberikan informasi capaian kinerja berbentuk bagan dan sta-tistik. Harus yang menarik, agar benar-benar menarik minat war-ga,” ujar bawahannya.

Sang pejabat pun sepakat den-gan hal itu. Publikasi tersebut pun berjalan selama beberapa bulan. Di tengah waktu, tiba-tiba insting menjiljat sang pejabat ter-pacu. “Masuk ini barang untuk olah-olah,” pikirnya.

Lalu, konsep yang sebelumnya disepakati pun diubah. Dari yang

sumur, dan sumber air alternatif, yang disertai dengan sosialisasi masif mengenai gerakan hemat air serta pola hidup adaptif kepada masyarakat.

Sementara untuk langkah jang-ka panjang, Yeremia mengusulkan pembangunan infrastruktur sum-ber daya air secara berkelanjutan serta pelaksanaan reboisasi dan konservasi di daerah tangkapan air. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem peringatan dini bencana kekeringan, yang diimba-ngi dengan pengembangan sektor pertanian tahan iklim melalui penerapan teknologi hemat air.

Yeremia mengingatkan bahwa langkah mitigasi yang disiapkan hari ini merupakan bentuk in-vestasi krusial untuk melindungi seluruh masyarakat Banten di masa depan.

”Mitigasi yang baik hari ini adalah investasi untuk melindungi masyarakat Banten di masa depan. Melalui semangat gotong royong dalam menghadapi El Nino, diha-rapkan Banten dapat menjadi lebih tangguh dan kesejahteraan ma-syarakat tetap terjaga,” tandasnya.

Di sisi lain, meskipun dampak

kekeringan kian meluas hingga dua daerah di Provinsi Banten yak-ni Kabupaten Serang dan Pan-deglang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pemprov Banten hingga kini belum berniat untuk menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Tak hanya status, Pemprov juga mengaku masih menahan untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana kekeringan yang melan-da sejumlah daerah. Pasalnya, ada sejumlah persyaratan regulasi yang hingga kini masih harus dipenuhi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ban-ten, Deden Apriandhi Hartawan menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih mempelajari mekanisme serta dokumen pendukung sebe-lum anggaran darurat tersebut disalurkan.

”Ini belum, karena nanti kita menunggu perkembangan. Tapi

Infrastruktur Dikejar...

Sambungan dari Halaman 1

mengatakan, pengesahan APBD Perubahan 2026 merupakan ben-tuk komitmen pemerintah ber-sama DPRD dalam mendorong per-cepatan pembangunan dan pelak-sanaan program prioritas.

”Ini adalah keinginan saya se-bagai walikota dan Pak Agis seba-gai wakil walikota untuk menjalan-kan percepatan pembangunan, percepatan program di Peme-rintah Kota Serang. Alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, sudah disepakati dan di-dukung oleh DPRD,” kata Budi usai mengikuti paripurna, Senin (24/8).

Setelah disepakati bersama, Pemkot Serang akan segera mem-bawa dokumen APBD Perubahan tersebut ke Pemerintah Provinsi Banten untuk dilakukan evaluasi oleh gubernur Banten Andra Soni. Setelah hasil evaluasi diterima oleh Pemkot Serang, anggaran akan segera dibahas dan dijalan-kan. Budi menyebut, pengesahan APBD Perubahan ini menjadi yang pertama di antara pemerintah kabupaten/kota se-Banten.

”Alhamdulillah ini yang pertama se-Banten, baru Kota Serang yang pertama. Kita kerjanya estafet,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan terse-but juga menjadi tolok ukur kinerja seluruh organisasi perangkat dae-rah (OPD) di lingkungan Pemkot

untuk membantu kabupaten/kota yang sekarang sudah menetapkan darurat kekeringan, Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada kita semua untuk membantu ban-tuan air bersih bagi masyarakat,” ujar Deden.

Meskipun BTT belum digelon-torkan, Pemprov Banten tetap melakukan langkah penanganan darurat di lapangan melalui sara-na yang ada. Deden menuturkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah dikerahkan untuk mendistribusikan air bersih ke titik-titik lokasi yang terdampak paling parah.

”Dan BPBD sudah melakukan pengiriman-pengiriman air bersih ke tempat-tempat yang memang sangat ekstrem kekeringannya,” tambahnya.

Terkait pencairan dana BTT yang disinggung sejumlah pihak, Sekda menjelaskan bahwa ada prosedur ketat yang tidak boleh di-

Serang. Ia menilai, capaian itu ti-dak terlepas dari dorongan kepada OPD agar mampu bekerja sesuai target yang telah ditetapkan.

”Anggaran perubahan terbesar di Kota Serang di akhir tahun,” katanya.

Budi menegaskan, infrastruktur menjadi sektor dengan perhatian terbesar dalam APBD Perubahan 2026. Hal itu sejalan dengan aspi-rasi masyarakat yang berdasarkan survei pemerintah menempatkan kebutuhan infrastruktur sebagai prioritas utama.

”Yang terbesar adalah infra-struktur, yang selalu digaungkan oleh masyarakat, teriakan infra-struktur,” ucapnya.

Selain infrastruktur, Pemkot Se-rang juga memprioritaskan sektor tenaga kerja serta pemerintahan dan pelayanan publik. Budi me-mastikan 13 program unggulan pemerintahannya terus berjalan secara bertahap sepanjang 2026.

Ia mengatakan, seluruh kebijaka-n pembangunan disusun berda-sarkan data dan hasil survei ma-syarakat yang dilakukan Badan Pe-rencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).

”Jadi kita kerjanya *by target*. 2026 ini, 2027 apa gitu. Bahkan insyaallah 2028 kita sudah punya target baru,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Ina

RUU Perampasan...

Sambungan dari Halaman 1

sil kejahatan.

”Asset recovery bukan cara nega-ra membiayai pembangunan dari kejahatan, melainkan cara negara mengembalikan kekayaan yang hilang akibat kejahatan kepada fungsi pembangunan yang sah,” ucap Hardjuno dalam rilis yang diterbitkan ANTARA, akhir pekan lalu.

RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 sebagai usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hardjuno menilai momentum pembahasannya perlu digunakan tidak hanya untuk memperkuat kemampuan negara mengambil kembali hasil kejahatan, tetapi juga membangun tata kelola yang memastikan kekayaan yang ber-hasil dipulihkan kembali kepada fungsi ekonomi dan sosial yang sah serta memberi manfaat bagi pembangunan nasional.

Ia menyebut perampasan aset merupakan instrumen penegakan hukum, sedangkan pemulihan aset merupakan proses menelusuri, mengamankan, dan mengem-balikan kekayaan kepada pihak yang secara hukum berhak. Sete-lah aset berada dalam penguasaan yang sah, kata dia, pengelolaan menjadi tahap untuk mengubah kekayaan tersebut menjadi man-faat ekonomi maupun sosial. De-ngan demikian, dia menekankan

Tradisi Ngeropok...

Sambungan dari Halaman 1

yang telah berlangsung turun-temurun itu menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan ulang tahun saya juga terserah saya!” tegasnya. Benar saja, perayaan ulang tahun dirinya diunggah di akun pemerintahannya itu.

Beberapa bulan kemudian, lem-baga anti-rasuah melakukan pe-nangkapan terhadap pejabat terse-but, atas dugaan korupsi. Saat di-giring menggunakan rompi pesa-kitan, ia ditanya oleh wartawan me-ngapa dirinya melakukan korupsi?

Lantas, ada dua kalimat yang tertahan di mulutnya: “Atas pe-rintah bapak penguasa” dan “Saya sudah bekerja sesuai dengan pe-rintah Undang-undang”.

Menurut pembaca, mana yang akan diucap olehnya?*

langgar dalam skema pengeluaran dana tak terduga tersebut.

”Oh, belum ya. Kalau BTT kan ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Nah, sementara ini kita masih pelajari itu dan menunggu nanti tindak lanjutnya,” tandasnya.

Sementara, diberitakan sebe-lumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mencatat, sedikitnya se-banyak 200 titik wilayah di Banten terdampak kekeringan hingga Sabtu 15 Agustus 2026.

Ratusan titik tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dan kota dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Lebak dan Kabu-paten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang.

Kepala BPBD Banten Lutfi Mu-jahidin menjabarkan, berdasarkan data BPBD Banten per 15 Agustus 2026, Kabupaten Lebak menjadi daerah dengan jumlah titik keke-

ringan paling banyak, yakni 98 titik.

Disusul dengan Kabupaten Ta-ngerang 45 titik,Kabupaten Pan-deglang sebanyak 44 titik, Kabu-paten Serang delapan titik, Kota Cilegon dua titik, Kota Tangerang Selatan dua titik, dan Kota Serang satu titik. Sementara Kota Tange-rang tercatat tidak memiliki keja-dian kekeringan.

Lutfi mengatakan, atas kondisi tersebut, hingga saat ini pihaknya terus mendistribusi air bersih un-tuk memenuhi kebutuhan masya-rakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

”Itu sudah tertangani. Yang menangani secara pentahelix, kita semua turun, baik TNI, Polri, te-man-teman Pramuka juga, kita BPBD kabupaten/kota, ada lem-baga masyarakat juga sudah turun, PMI, LAZ, BAZNAS juga ada turun semuanya sesuai titik-titik yang memang menjadi binaan mereka,” kata Lutfi.(MPD/ENK)

keuangan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Dalam APBD Perubahan 2026, Pemkot Serang juga mengalokasikan ang-garan untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.

”Untuk tiga juta rumah alham-dulillah juga masuk. Pengaloka-sian di perubahan ini hampir Rp21 miliar,” ungkap Ina.

Dalam kesepakatan tersebut, belanja daerah ditetapkan menca-pai Rp1.747.002.492.860, sedang-kan pendapatan daerah sebesar Rp1.684.483.507.348. Dengan komposisi tersebut, Perubahan APBD Kota Serang 2026 menga-lami defisit anggaran sebesar Rp62.518.985.512.

Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Ang-garan (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. SiLPA yang digunakan men-capai Rp73.018.985.512. Angka tersebut kemudian dikurangi pe-ngeluaran pembiayaan sebesar Rp10.500.000.000 sehingga pem-biayaan netto menjadi Rp62.518.985.512.

Dengan struktur tersebut, Per-ubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2026 berada dalam kondisi seimbang. Sementara itu, SiLPA pada akhir tahun anggaran diproyeksikan nihil.(CR02/ENK)

aset hasil perampasan tidak oto-matis dapat dianggap sebagai dana pembangunan.

”Aset yang dipulihkan dapat berbentuk tanah, bangunan, ken-daraan, saham, perusahaan, mau-pun bentuk kekayaan lainnya,” katanya.

Hardjuno mengatakan aset baru dapat memperkuat pembiayaan pembangunan apabila melalui mekanisme hukum dan pengelo-laan yang sah menghasilkan pe-nyerimaan negara atau manfaat ekonomi yang dapat digunakan sesuai ketentuan keuangan nega-ra. Karena itu, sambung dia, apa-bila pengelolaan aset mengha-silkan penerimaan negara, seluruh penerimaan tersebut harus masuk melalui mekanisme keuangan negara dan penganggaran resmi.

Menurutnya, prinsip itu penting untuk menjaga disiplin fiskal dan akuntabilitas sekaligus mencegah munculnya ‘kantong dana’ baru yang minim pengawasan publik dan DPR. Dia pun memberi perha-tian pada risiko penyalahgunaan kewenangan sehingga penguatan kemampuan negara dalam me-mulihkan aset harus diikuti pem-batasan kewenangan dan sistem pengawasan yang kuat, terutama dalam penerapan perampasan aset tanpa didasarkan pada pu-tusan pembedanaan (NCB).

Maka dari itu, ia berpendapat RUU perlu memberikan kepastian

muran Masjid (DKM) Baiturrah-man Sentul Sukawana, Sofiullah, menuturkan bahwa tujuan utama pelaksanaan Maulid Nabi setiap tahun adalah sebagai bagian dari syiar Islam dan bentuk penghorm-atn kepada Rasulullah SAW.

”Tujuan utama adalah kita ber-syiar mengagungkan Rasulullah atas lahirnya Rasulullah,” ung-kapnya.

Ia menjelaskan, dalam tradisi ngeropok, masyarakat berkumpul dan mengikuti rangkaian kegiatan dengan suasana penuh kebersa-maan.

Meski pada dasarnya tidak ada larangan bagi umat Islam untuk mengikuti kegiatan tersebut, me-nurutnya, dalam kebiasaan ma-syarakat setempat, kaum laki-laki

lebih banyak terlibat dalam kegiat-an ngeropok.

”Kalau masalah ngeriung tidak ada larangan. Tetapi ada yang pan-tas terutama laki-laki, masa pe-rempuan ngeropok, tapi sebenar-nya mah setiap umat Islam kalau mau memperingati sah-sah saja tapi yang lebih pantas laki-laki,” ujarnya.

Tradisi ngeropok pun menjadi salah satu warna tersendiri dalam perayaan Maulid Nabi di Banten. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat Sentul Sukawana beru-paya mempertahankan tradisi terse-but sebagai ruang untuk mem-pererat silaturahmi, menjaga keber-samaan, sekaligus mengekspre-sikan kecintaan kepada Nabi Mu-hammad SAW.(ENK)

NASIONAL

Cabut Izin Korporasi Nakal

SIKAT DALAM KARHUTLA

JAKARTA, BANPOS - Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini mendapat respons sangat keras dari pemerintah pusat. Fenomena alam ekstrem El Nino diprediksi akan memperparah krisis mematikan tersebut. Kondisi cuaca yang mengering ini memicu kerawanan tinggi di berbagai wilayah Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan larangan mutlak pembukaan lahan dengan cara dibakar. Aparat penegak hukum diinstruksikan segera mengusut tuntas indikasi keterlibatan

berbagai perusahaan. Presiden berjanji tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi praktik sangat kotor ini. “Seluruh izin korporasi itu, kita cabut. Saya tidak main-main,” tegas Prabowo.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut memperingatkan publik atas tingginya risiko penyebaran titik api. Pihaknya menghimbau seluruh masyarakat menunda sementara aktivitas pembukaan area kebun baru hari ini. Upaya tersebut terus dioptimalkan supaya krisis polusi asap tidak melumpuhkan kehidupan warga.

Pemerintah mengklaim selalu

mempertimbangkan nilai budaya lokal dalam menyusun setiap regulasi pelestarian alam. Namun, cuaca panas ekstrem memaksa aparat memberlakukan pembatasan aktivitas secara lebih masif lagi. Pendekatan persuasif akan tetap diutamakan tanpa sama sekali mengesampingkan ketegasan penegakan hukum. “Sekali lagi bukan kita tidak peduli dengan kearifan lokal,” ingat Raja.

Kementerian Kehutanan saat ini sedang memperluas ranah investigasi kasus kejahatan lingkungan lintas daerah.

Penyelidikan menyasar dugaan kuat mafia jual beli area suaka margasatwa serta pembakaran lahan perusahaan. Sejumlah tersangka dari individu perorangan dan lembaga korporasi secara resmi telah ditahan kepolisian.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu memastikan proses penyidikan tidak pernah terhenti. Seluruh kronologi peristiwa dan para aktor utama yang mengeruk pundi keun-tungan terus ditelusuri intensif. Pihaknya bersumpah segera menjerat dalang paling utama di

balik kasus perusakan ekosistem berharga tersebut.

“Semua kami kembangkan berdasarkan alat bukti untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses,” tegas Rudianto.

Selain ancaman penjara, tingkat pengawasan izin bagi pihak pengelola hak guna usaha lahan turut diperketat kuat. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyoroti lemahnya prosedur sistem mitigasi. Tiap pemegang lisensi wilayah wajib segera menyiapkan sumber cadangan air serta

skuat patroli api siaga tanggap.

Perjuangan gigih regu pemadam menjinakkan kobaran api semestinya ditimpali sanksi sangat tegas. Negara bersiap merumuskan denda ganti rugi materiil bernilai fantastis bagi korporasi nakal. Ancaman pemiskinan ini diharapkan menciptakan dampak jera permanen bagi seluruh aktor perusak.

“Pemegang izin memiliki hak untuk menjalankan usaha, tetapi mereka juga punya kewajiban untuk menjaga arealnya dan mencegah kebakaran,” tandas Januanto. (ANT/AZM)

Kementrans Arahkan Kawasan Transmigrasi jadi Pusat Ekonomi Baru

JAKARTA, BANPOS - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengarahkan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang membuka pekerjaan produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal, serta menarik investasi di tengah perubahan ekonomi dan geopolitik global.

Menteri Transmigrasi M. Ifritah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pembangunan kegiatan ekonomi memang harus mendahului perpindahan penduduk.

“Masa depan transmigrasi bukan memindahkan orang terlebih dahulu lalu dan berharap peluang ekonomi menyusul. Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan,” kata Menteri Ifritah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, masyarakat akan datang dan menetap secara sukarela apabila suatu kawasan menawarkan pekerjaan, peluang usaha, infrastruktur, dan prospek kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, kawasan transmigrasi harus dibangun sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat, lahan, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, industri, dan pasar.

Ekosistem tersebut harus mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari riset dan pembibitan, produksi, pengolahan, penge-masan, logistik, hingga pema-



Menteri Transmigrasi M. Ifritah Sulaiman Suryanagara dalam Transmigration Executive Dialogue (TED) di Jakarta, Senin (24/8/2026)

saran. Dengan pendekatan ini, lebih banyak nilai tambah dapat diciptakan di dalam kawasan dan dinikmati oleh masyarakat setempat.

Menteri Ifritah mencontohkan, tingginya konsumsi durian di China yang nilainya mencapai sekitar Rp137 triliun per tahun, tidak seharusnya hanya menjadi peluang untuk mengekspor komoditas mentah, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun ekosistem industri durian di Indonesia.

“Kita tidak boleh berhenti pada menanam dan mengekspor komoditas mentah. Kita harus membangun seluruh ekosistem ekonominya di Indonesia, mulai dari riset dan pembibitan hingga budidaya, pengolahan, logistik, produk hilir, dan pemasaran

global,” ujarnya.

Paradigma baru tersebut dijalankan melalui lima program unggulan Kementerian Transmigrasi.

Adapun kelima program itu yakni, Trans Tuntas memberikan kepastian hukum atas lahan; Trans Lokal memastikan masyarakat setempat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat pembangunan; Trans Patriot menghadirkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi ke kawasan.

Kemudian Trans Karya Nusantara mendorong investasi dan penciptaan pekerjaan sebelum perpindahan penduduk; sedangkan Trans Gotong Royong memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

(ANTARA/HOKEMENTERIAN TRANSMIGRASI)

kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” ujarnya.

Ifritah menegaskan bahwa pembangunan kawasan tidak boleh menggosur atau menjadikan masyarakat lokal sebagai penonton. Masyarakat setempat harus menjadi tuan rumah, pelaku utama, dan penerima manfaat pembangunan.

Investasi dan industri perlu tumbuh, tetapi nilai tambah, pekerjaan, pengetahuan, serta kesejahteraan juga harus tumbuh di daerah tersebut.

Professor of Economics dari Adam Smith Business School, University of Glasgow, Soner Baskaya menyebut transmigrasi sebagai “the right programme at the right time.”

Menurut dia, posisi politik Indonesia yang relatif netral, letaknya yang strategis pada jalur perdagangan dunia, serta kekayaan sumber daya alam menempatkan Indonesia pada posisi yang menguntungkan di tengah perubahan rantai pasok global.

“Posisi Indonesia saat ini sangat menguntungkan di mata dunia. Indonesia memiliki posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan yang strategis, serta kekayaan alam penting seperti nikel yang sangat dibutuhkan industri masa depan, mulai dari baterai hingga kendaraan listrik,” kata Baskaya dalam Transmigration Executive Dialogue (TED), dikutip di Jakarta, Selasa.

Namun, peluang tersebut

harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Investasi yang masuk ke kawasan transmigrasi tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan warga, mengerjakan usaha lokal, dan membangun hubungan dengan industri serta pasar yang lebih luas.

Baskaya menilai kawasan transmigrasi perlu didukung pusat pengolahan hasil bumi, jaringan logistik, fasilitas modern, akses pembiayaan, dan ekosistem inovasi.

Dengan demikian, masyarakat tak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat dari proses produksi dan rantai nilai yang lebih panjang.

Pendekatan baru transmigrasi, menurutnya, dapat menjadi instrumen untuk menghadirkan kawasan, menarik investasi dan talenta, serta mendorong penyebaran ilmu pengetahuan.

Tujuannya adalah menciptakan kawasan yang produktif, berkembang, dan menarik untuk menjadi tempat bekerja maupun membangun kehidupan.

Bagi masyarakat, perubahan tersebut berarti terbukanya lebih banyak pilihan pekerjaan tanpa harus selalu berpindah ke kota besar. Petani dan pelaku UMKM juga berpeluang memperoleh teknologi, pembiayaan, mitra usaha, dan akses pasar yang lebih luas.

Baskaya mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi tersebut tidak cukup dinilai dari besarnya investasi yang diumumkan atau banyaknya program yang dijalankan. (ANT/PAY)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Rasuna Said akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan perantara KPKNL Tangerang I, terhadap aset jaminan debitur Rohidi S berupa :

Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam diatasnya terdiri dari sesuai SHGB Nomor 00856 tercatat atas nama Rohidi S, terletak di Komplek Perum, Mahkota Simprug Blok B.4 No.11, Jalan Perum Mahkota Simprug, Kelurahan/Desa Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

(Harga Limit Rp. 450.000.000, Setoran Jaminan Rp. 45.000.000).

- Cara Penawaran** : Terbuka, Melalui Internet (*Open Bidding*)
- Pelaksanaan Lelang, Hari/Tanggal** : Rabu, 09 September 2026
- Waktu Penawaran** : Sejak tayang di aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran** : 09 September 2026, 09.00 WIB (sesuai Waktu Server).
- Alamat Domain Lelang** : www.lelang.go.id
- Tempat** : KPKNL Tangerang I, Jl. Taman Makam Pahlawan, Taruna, Kota Tangerang.
- Penetapan Pemegang** : setelah batas akhir penawaran
- Bea Lelang Pembeli** : 2 % dari harga lelang
- Pelunasan Harga Lelang** : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Keterangan:

- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal Jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang akan dikenakan PPN oleh Penjual sebesar 1,1% dari harga lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Syarat-syarat lelang :

- Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id, Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada website tersebut. Obyek Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang I & PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman in terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Rasuna Said.

Jakarta, 26 Agustus 2026

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Rasuna Said

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Retail Collection & Recovery Region 14 Branch Cilegon, akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan dengan jenis penawaran lelang tanpa kehadiran peserta melalui internet (*open bidding*) dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang/KPKNL Serang terhadap agunan debitur an ELMAZANI berupa :

Sebidang tanah dengan luas : 112 M2, sesuai dengan SHM No. 4189/Ciwedus, Tanggal, 18 Agustus 2017, sertifikat tersebut tercatat an ELMAZANI, berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat diatasnya yang terletak di : Perumahan Bumi Rakata Asri Cluster Grand Rakata Residence Blok H-5 No. 27 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten

• (Nilai Limit Lelang : Rp 805.700.000,- & Uang Jaminan : Rp 161.200.000,-)

Keterangan :

- Nominal uang jaminan yang disetorkan ke rekening VA (*virtual account*) harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan.
- Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Retail Collection & Recovery Region 14 & BNI Kantor Cabang Cilegon di nomor telepon : 085180656553 an Wilfredo Josua, 085920137817 Ari Junaidi, 081293102279 M Imroni & di No (0254) 216361 KPKNL Serang.

Persyaratan lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
- Barang dijual dalam kondisi apa adanya (*as is*). Calon peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juriid/legat, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tuntutan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditunjuk sebagai pembeli.

Pelaksanaan lelang :

Hari & Tanggal	Rabu, 09 September 2026
Waktu Penawaran	Sejak tayang nadia aplikasi lelang s/d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	09 September 2026, 10:34 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	www.lelang.go.id
Tempat Lelang	KPKNL Serang Jalan Raya Serang-Cilegon Km.3 Legok Serang Ruang Lelang
Penetapan Pemegang	Setelah Batas Akhir Penawaran
Batas Waktu Pelunasan	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi pembeli dinyatakan wanprestasi uang jaminan disetor ke kas negara
Bea Lelang Pembeli	2% (dua persen) dari harga terbentuk lelang

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2026

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
Divisi Retail Collection & Recovery Region 14

KPKNL SERANG

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Rasuna Said akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan perantara KPKNL Tangerang I, terhadap aset jaminan debitur Syafril berupa :

Sebidang tanah seluas 104 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam diatasnya terdiri dari sesuai SHM Nomor 03701 tercatat atas nama Syafril terletak di Jalan H Mochtar 1 No 17 A, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

(Harga Limit Rp. 1.000.000.000, Setoran Jaminan Rp. 100.000.000).

- Cara Penawaran** : Terbuka, Melalui Internet (*Open Bidding*)
- Pelaksanaan Lelang, Hari/Tanggal** : Rabu, 09 September 2026
- Waktu Penawaran** : Sejak tayang di aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran** : 09 September 2026, 09.10 WIB (sesuai Waktu Server).
- Alamat Domain Lelang** : www.lelang.go.id
- Tempat** : KPKNL Tangerang I, Jl. Taman Makam Pahlawan, Taruna, Kota Tangerang.
- Penetapan Pemegang** : setelah batas akhir penawaran
- Bea Lelang Pembeli** : 2 % dari harga lelang
- Pelunasan Harga Lelang** : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Keterangan:

- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal Jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang akan dikenakan PPN oleh Penjual sebesar 1,1% dari harga lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Syarat-syarat lelang :

- Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id, Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada website tersebut. Obyek Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang I & PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman in terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Rasuna Said.

Jakarta, 26 Agustus 2026

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Rasuna Said

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Semanggi akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan perantara KPKNL Tangerang I, terhadap aset jaminan debitur Taruna Argapati berupa :

Sebidang tanah seluas 99 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat dan berdiri diatasnya, terletak di Jalan Kemiri VI Nomor 168 A, Kelurahan/Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Sesuai SHM No. 06846, atas nama Taruna Argapati.

(Harga Limit Rp.1.000.000.000, Setoran Jaminan Rp.200.000.000).

- Cara Penawaran** : Terbuka, Melalui Internet (*Open Bidding*)
- Pelaksanaan Lelang, Hari/Tanggal** : Rabu, 09 September 2026
- Waktu Penawaran** : Sejak tayang di aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran** : 09 September 2026, 10.00 WIB (sesuai Waktu Server).
- Alamat Domain Lelang** : www.lelang.go.id
- Tempat** : KPKNL Tangerang I, Jl. Taman Makam Pahlawan, Taruna, Kota Tangerang.
- Penetapan Pemegang** : setelah batas akhir penawaran
- Bea Lelang Pembeli** : 2 % dari harga lelang
- Pelunasan Harga Lelang** : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Keterangan:

- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal Jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang akan dikenakan PPN oleh Penjual sebesar 1,1% dari harga lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang termasuk BPHTB dan tunggakan PBB.

Syarat-syarat lelang :

- Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id, Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada website tersebut. Obyek Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang I & PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman in terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Semanggi 081818200650.

Jakarta, 26 Agustus 2026

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Semanggi

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Retail Collection & Recovery Region 14 Branch Cilegon, akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan dengan jenis penawaran lelang tanpa kehadiran peserta melalui internet (*open bidding*) dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang/KPKNL Serang terhadap agunan debitur an MUHAMMAD FAISHAL IHSAH berupa :

Sebidang tanah dengan luas : 72 M2, sesuai dengan SHM No. 02160/Cikerei, Tanggal, 14 September 2021, sertifikat tersebut tercatat an MUHAMMAD FAISHAL IHSAH, berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat diatasnya yang terletak di : Perumahan Griya Alam Cikerai Blok. B-2 No. 07 Kelurahan Cikerei, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

• (Nilai Limit Lelang : Rp 370.500.000,- & Uang Jaminan : Rp 74.100.000,-)

Keterangan :

- Nominal uang jaminan yang disetorkan ke rekening VA (*virtual account*) harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan.
- Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Retail Collection & Recovery Region 14 & BNI Kantor Cabang Cilegon di nomor telepon : 085180656553 an Wilfredo Josua, 085920137817 Ari Junaidi, 081293102279 M Imroni & di No (0254) 216361 KPKNL Serang.

Persyaratan lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
- Barang dijual dalam kondisi apa adanya (*as is*). Calon peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juriid/legat, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tuntutan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditunjuk sebagai pembeli.

Pelaksanaan lelang :

Hari & Tanggal	Rabu, 09 September 2026
Waktu Penawaran	Sejak tayang nadia aplikasi lelang s/d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	09 September 2026, 10:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	www.lelang.go.id
Tempat Lelang	KPKNL Serang Jalan Raya Serang-Cilegon Km.3 Legok Serang Ruang Lelang
Penetapan Pemegang	Setelah Batas Akhir Penawaran
Batas Waktu Pelunasan	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi pembeli dinyatakan wanprestasi uang jaminan disetor ke kas negara
Bea Lelang Pembeli	2% (dua persen) dari harga terbentuk lelang

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2026

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
Divisi Retail Collection & Recovery Region 14

KPKNL SERANG

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Semanggi akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan perantara KPKNL Tangerang I, terhadap aset jaminan debitur Ilham Mukaddas Lukman berupa :

Sebidang tanah seluas 125 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat dan berdiri diatasnya, terletak di Kesehatan Residence, Jalan Kesehatan III Nomor 168-J, Kelurahan/Desa Cipayat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Sesuai SHM No. 07279, atas nama Ilham Mukaddas Lukman.

(Harga Limit Rp.1.592.000.000, Setoran Jaminan Rp.200.000.000).

- Cara Penawaran** : Terbuka, Melalui Internet (*Open Bidding*)
- Pelaksanaan Lelang, Hari/Tanggal** : Rabu, 09 September 2026
- Waktu Penawaran** : Sejak tayang di aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran** : 09 September 2026, 09.50 WIB (sesuai Waktu Server).
- Alamat Domain Lelang** : www.lelang.go.id
- Tempat** : KPKNL Tangerang I, Jl. Taman Makam Pahlawan, Taruna, Kota Tangerang.
- Penetapan Pemegang** : setelah batas akhir penawaran
- Bea Lelang Pembeli** : 2 % dari harga lelang
- Pelunasan Harga Lelang** : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Keterangan:

- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal Jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang akan dikenakan PPN oleh Penjual sebesar 1,1% dari harga lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang termasuk BPHTB dan tunggakan PBB.

Syarat-syarat lelang :

- Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id, Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada website tersebut. Obyek Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang I & PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman in terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Semanggi 081818200650.

Jakarta, 26 Agustus 2026

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Semanggi

HNSI Sebut Kewenangan Pemerintah Bukan Organisasi

Retribusi TPI Naik, Bakul Ikan Binuangeun Menjerit

LEBAK, BANPOS - Sejumlah pengusaha bakul ikan yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higenis Binuangeun, Desa Muara Ke-

Salah seorang pengusaha bakul ikan di TPI Higienis Binuangun, Kalipin mengaku keberatan de-

Disebutkan, kenaikan retribusi pelang ikan yang awalnya hanya 3 persen kini menjadi kurang lebih 4

retribusi lelang ikan ini, yang mana sebelumnya hanya 3 persen saja, tetapi sejarang 4 persen lebih. Ini menyusahkan," ujar Kalipan.

Menurutnya, seharusnya pemerintah sebelum mengenakan retribusi lelang ikan, mesti melihat dulu ke bawah agar tahu layak atau tidaknya dinaikan tarif retribusi itu.

kecil, dinaikannya tarif retribusi lelang ini, keuntungan kami tidak seberapa dan kami mau makan apa, menjual ikan itu tidak gampang. Coba 3 persen saja," tuturnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kecamatan Wanasalam, yang juga pedagang bakul ikan, Toton Sopyan, mengatakan bahwa kenaikan

tarif retribusi lelang ikan itu keputusan dari pemerintah, bukan kewenangan HNSI.

“Naiknya tarif retribusi lelang ikan itu adalah keputusan pemerintah, bukan kewenangan HNSI, para pengusaha bakul ikan agar faham hal ini,” ucapnya.

Kata Toton, pihaknya bersama para pengusaha bakul ikan akan

menyampaikan hal itu kepada pemerintah daerah agar mereka memahami keluhan para bakul tersebut.

“Kita semua akan sampaikan kepada pemerintah apa yang terjadi di lapangan, supaya pemerintah tahu keluhan masyarakat dan para pengusaha bakul ikan di bawah tidak menjerit,” tukasnya. (WDO/RUS)



Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, Sofwan Kurnia, berserta jajaran PLN saat memanfaatkan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) sebagai bahan bakar alternatif co-firing pada pembangkit listrik.

[illegible][illegible]

Limbah Uang Kertas Diubah Jadi Bahan Bakar

SERANG, BANPOS- Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten bersinergi dengan PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Banten 1 Suralaya memanfaatkan Limbah Rakic Uang Kertas (LRUK) sebagai bahan bakar alternatif co-

Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Sofwan Kurnia, di Serang, Selasa (25/8) mengatakan langkah inovatif ini merupakan bagian dari upaya mengubah limbah hasil pemusnahan uang rupiah menjadi

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGAPAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Retail Collection & Recovery Region 14 akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang dengan cara penawaran melalui Internet (tanpa kehadiran peserta) terhadap pinjaman debitur an. **Karmila** sebagai berikut:

Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Jaminan Penawaran Lelang (Rp)
Tanah berikat bangunan ruko yang terletak di Komplek Ruko Perumnas Grand Clegion Residence, Jl Nuri No. 08, Kal. Cibeber, Kec. Cibeber, kota Clegion, Banten, Bukti Kepemilikan SHGB No. 02702/Cibeber, Tk. 09/11/2020 an. Karmila LT : 108 m2 & LB : 255 m2	Rp 1.574.000.000,-	Rp 310.000.000,-

Adapun proses lelang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	Rabu, 09 September 2020
Jenis Penawaran	Open bidding
Waktu Penawaran	Sejak tayang pada aplikasi s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	02 September 2022, Pkl. 10,40 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB
Alamat Domain	lelang.go.id
Tempat Lelang	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, Jl. Raya Serang-Clegion Km. 3, Legok Serang- E Auction Corner.
Penetapan Pememen	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi, maka dinyatakan wanprajatu, yang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetor ke Kas Negara.
Boa Lelang Pembeli	2% (dua persen) dari harga lelang

SYARAT – SYARAT DAN KETENTUAN MENGURUTKAN LELANG:

- Membuka Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
- Membeli objek lelang dengan mengakses alamat di atas. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), semua resiko ditanggung pembeli dan Pemegang lelang akan melakukan gugatan kepada KPKNL Serang dan Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang.
- Menyampaikan jaminan melalui Virtual Account (VA) yang akan dikirimkan dan dibagikan secara otomatis dari alamat website diatas setelah memilih objek lelang dan mengikuti lelang. Nominal Uang Jaminan harus sama dengan disyaratkan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59).
- Anwarizung : Calon peserta dapat melihat objek yang akan dilelang sejak pengumuman lelang diterbitkan dan dapat menghubungi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Retail Collection & Recovery Region 14 Gedung BNI BSD Lantai 8, Jalan Pantolan Sekeloa, Kertajati, Kabupaten Lrt 1-5 Lengkong Gudang BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Tlp. 021-80286844/ Hpt: 082365132611, KPKNL Serang, Jl. Raya Serang-Clegion Km. 3, Legok Serang- E Auction Corner.



KPKNL Serang

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2020

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Retail Collection & Recovery Region 14

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGAPAN

Berdasarkan Pasal 6 UHTT No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk akan melaksanakan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggapan berdasarkan peraturan Kantor Pelayanan Kepanitiaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, antara lain sebagai peserta lelang melalui internet dengan penawaran open bidding terhadap jaminan debitor atas nama SETYO NUGROHO 69 Mr:

1 (satu) bidang seluas 69 M² berikhtungan bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tetap di atasnya, Sesuai SHM No. 2862 terletak di Perumahan Silwangi Regency Blok H No.4 Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Prov.Banten yang terdapat atas nama WIDYA YUWANA ARISANTI
Harga Limit Rp 135.510.000,- Uang Jaminan Rp 27.102.000,-

Pelaksanaan Lelang :	KPNKL Serang, Jl.Raya Serang-Cilegon KM 3, Kelurahan Drangong, Kecamatan Takikan , Serang 42162
Tempat Pelaksanaan Lelang	
Waktu Pelaksanaan Lelang	Rabu, 9 September 2026, Jam 11:10 WIB (Sesuai Waktu Server)
Waktu Penawaran	Selayak waktu di gelang go id s.d batas akhir penawaran
Pelunasan harga lalang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan akhir
Bea lalang pembeli	2% dari harga akhir penawaran
Penetapan Pemegang	Status bebas akhir penawaran

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

Mengikuti auction yang telah verifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat melalui link alamat diatas.

Nomor VA peserta lelang wajib menyertai uang jaminan ke nomor VA (*Virtual Account*) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang didalam domain masing-masing peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan distorsikan sekaligus. (tidak boleh dicicil), harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Serang paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

Pemegang lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, maka uang jaminan yang telah distorsikan akan distorsikan ke Kas Negara.

Barang yang di lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), dan dapat dilihat dilampiran objek lelang berada sejak pengumuman ini diumumkan, dan peserta lelang dianggap telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta bersedia bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun legal yuridis.

Pemegang lelang, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang berlaku sejak 5 Januari 2024 berlaku ketentuan NPOK yang menjadi dasar pemberian BPHK oleh pemerintah pusat kepada daerah yang memiliki nilai transaksi dan NJOP tahun terjadinya transaksi vide Pasal 46 ayat (3) UU HKPD.

Pemegang lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023.

Apabila pemenang lelang ternyata tidak memenuhi persyaratan lelang terhadap barang tersebut maka pihak yang berkewajiban/peminal lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada pejabat lelang / KPKNL Serang/PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Pemohon lelang barang/jawab penuh tuntutan: tuntutan ganti rugi dan/atau dwangsom/luang paksa yang mungkin timbul di kemudian hari dan membebankan KPKNL Serang/Cilegon LeLang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau dwangsom/luang paksa tersebut.

9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Serang, atau KPKNL Serang Jl. Raya Serang-Cilegon KM 3, Kelurahan Drangong,Kecamatan Takikan, Serang 42162



Jakarta, 26 Agustus 2026

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

barang bernilai guna, sekaligus mendukung penerapan ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan.

Ia menjelaskan bahwa LRUK yang digunakan dalam kerja sama tersebut merupakan material hasil pemusnahan uang tidak layak edar. Uang tersebut diracik menjadi partikel kecil sehingga tidak dapat lagi dikenali berdasarkan nominal maupun bentuk aslinya.

"Apa yang hari ini kita manfaatkan bukan lagi uang, melainkan limbah hasil pemusnahan uang yang telah kehilangan nilai dan fungsinya. Namun, kehilangan nilai sebagai alat pembayaran bukan berarti kehilangan manfaat," ujarnya.

Dalam praktiknya, LRUK dimanfaatkan sebagai campuran biomassa pada proses co-firing bersama Bahan Bakar Jumptan Padat (BBJP) yang berasal dari hasil pengolahan sampah. Kandungan serat pada limbah uang kertas tersebut dinilai sangat mendukung untuk dijadikan bahan bakar pembangkit listrik.

Sofwan mengungkapkan, volume pasokan LRUK yang dihasilkan terbilang cukup besar. Dalam satu kali pengiriman, jumlahnya dapat mencapai 4 hingga 8 ton, yang dikemas ke dalam 100 hingga 200 karung seberat 40 kilogram per karung nya. Menurut nya, pengelolaan limbah

PENGUMUMAN KEDUA LELAN
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggung
Cabang Utama Serang akan melaksanakan Lelan

Marsal Nara Kowaluk Sesibidh tanah dengan luas tanah 45 m² dan segala sesuatu yang berdiri/tertanah di atasnya yang terletak di Komp. Ruko/Ruko Aryana Karawaci Cluster Rutis Garden, Jl. Raya Sukabakti Blok BB No. 7, Desa. Sukabakti, Kec. Curing, Kab. Tanggar, Prov. Banten. SHGB 02427/Sukabakti an. Morsel Mario Kowaluk. Sebesar Rp 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Tujuh Rupiah) dengan nilai jaminan 20% sebesar Rp 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah).	
Cara Penawaran	: <u>Open Bidding</u> (dengan mengakses website https://lelang.go.id)
Mulai Penawaran	: Sejak pengumuman gelangb terbit atau data gelang tayang pada website LeLang DJKN (Portal LeLang Indonesia)
Batas Akhir Penawaran	: Rabu, 09 September 2026 Pukul 09.30 Waktu Server Eucasion (WIB)
Waktu dan Tempat Penetapan Pemang LeLang	: Setelah batas akhir penawaran, bertempat di KPKNL Tanggerang I Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tanggerang
Pelunasan Harga LeLang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan gelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi, uang jaminan gelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorakan ke Kas Nagara.
Baa LeLang Pembeli	: 2% (dua persen) dari harga gelang

Keterangan :

- Nomor Setoran Jaminan yang disetorakan ke Rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nomina Setoran jaminan yang disetorakan.
- Setoran jaminan harus sudah efektif diterima oleh Kantor KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan gelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme PERBANKAN menjadi beban Peserta LeLang.
- Calon peserta LeLang dapat melihat objek yang akan dielang sejak diterbitkannya pengumuman gelang.
- Objek gelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terbit gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan gelang terhadap objek gelang tersebut di atas, segala biaya yang berkenaan/pengisnast/jaminan gelang tidak dipertanyakan dan akan melakikan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tanggerang I dan PT. Bank Panin, Tbk. Kantor Cabang Utama Serang.
- Informasi dapat menghubungi **PT. Bank Panin, Tbk. Kantor Cabang Utama Serang Telp. (021) 92621600, KPKNL Tanggerang I, Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tanggerang 15111 Telp. (021) 92682320.**
- Pemang gelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.41 Tahun 2023 dikenakan PPN 1,1% dari harga jual/lelang.

Persyaratan LeLang :

1. Memiliki uang gelang telah verifikasi pada website <https://lelang.go.id>, syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti gelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti gelang dapat dilihat pada website di atas.



BANPOS CHANNEL



WWW.BANPOS.CO



BANTENPOS@GMAIL.COM



BANTEN_POS



BANTEN POS

459 Buruh Menanti Pesangon Rp59 Miliar

Said Iqbal Dorong Penyegelelan Eks PT Jabatex

TANGERANG, BANPOS - Persoalan pembayaran hak pesangon ratusan mantan pekerja PT Jabatex di Cibodas, Kota Tangerang, kembali mencuat setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mendatangi lokasi perusahaan, Senin (29/8).

Kedatangan Said Iqbal dilakukan setelah bertahun-tahun para mantan pekerja menunggu pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak mereka. Perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit, tetapi pembayaran hak pekerja hingga kini belum terealisasi. Saat tiba di lokasi PT Jabatex di Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Said Iqbal dan rombongan tidak dapat masuk karena pintu gerbang perusahaan dalam keadaan terkunci.

Said Iqbal menilai kondisi tersebut menunjukkan belum adanya itikad baik dari pihak pengusaha untuk mmenjalankan proses hukum yang telah berjalan. "Kami mencoba masuk tapi tidak bisa karena pintu mgerbang dikunci. Ini tanda menunjukkan memang tidak ada good faith, tidak ada itikad baik daripada pengusaha," kata Said Iqbal.

Ia mengatakan, negara tidak boleh kalah ketika berhadapan dengan persoalan hak pekerja yang telah memiliki dasar hukum. Menurut Said, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antara pekerja dan perusahaan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan kewajiban negara memastikan putusan pengadilan dapat dilak-

sanakan. "Negara tidak boleh kalah," ujarnya.

Setelah meninjau kondisi di lokasi, Said Iqbal bersama sejumlah pihak menggelar pembahasan mengenai langkah yang akan dilakukan untuk menuntaskan persoalan tersebut. Pihak yang terlibat antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, kurator, kepolisian, serta pihak terkait lainnya.

Dari pembahasan itu, disepakati akan dilakukan rapat koordinasi dengan Pengadilan Negeri dan instansi terkait. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026 di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. "Harus ada rapat koordinasi dengan Pengadilan Negeri dengan pejabat-pejabat tadi.

Diputuskan tanggal 31 Agustus 2026 bertempat di Kantor Disnaker Kota Tangerang," kata Said Iqbal. Setelah rapat koordinasi, langkah berikutnya yang direncanakan adalah penyegelelan terhadap aset perusahaan pada 7 September 2026. "Setelah rapat koordinasi ini berjalan, rencana akan dilakukan penyegelelan tanggal 7 September 2026," ujarnya. Penyegelelan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses eksekusi terhadap aset perusahaan yang telah masuk dalam proses kepailitan.

Said mengatakan, setelah penyegelelan dilakukan, kurator akan menjalankan tugasnya untuk melakukan penyitaan dan proses lelang terhadap aset yang dapat

digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor, termasuk mantan pekerja. Berdasarkan informasi dari kurator, aset PT Jabatex berupa tanah dan bangunan mencapai sekitar 14 hektar.

Sementara total tagihan kreditor disebut mencapai sekitar Rp139 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar Rp59 miliar hak pesangon yang harus dibayarkan kepada 459 orang buruh. "Kurator akan bekerja. Melakukan sita lelang jaminan. Katanya ada bangunan dan tanah 14 hektar. Sedangkan tagihan kreditor kata kurator itu Rp139 miliar, termasuk di dalamnya pembayaran pesangon buruh Rp59 miliar yang wajib dibayar kepada 459 orang," kata Said Iqbal. Ia meminta para mantan pekerja tidak khawatir terhadap proses tersebut.

Dia memastikan hak pekerja akan menjadi salah satu hal yang diperjuangkan dalam proses penyelesaian kepailitan. "Kawan-kawan buruh jangan takut. Kita akan bayarkan hak-hak buruh sesuai aturan," katanya. Ia juga menyebut kurator telah menyampaikan komitmen untuk mendahulukan hak-hak pekerja.

Menurutnya, jika nilai aset perusahaan memang lebih besar dibandingkan total tagihan kreditor, seharusnya tidak ada alasan lagi bagi proses penyelesaian hak buruh untuk kembali tertunda.

Ketua koordinator mantan pekerja PT Jabatex, Misno, mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung lebih dari satu dekade. Menurut dia, persoalan bermula

pada Januari 2015 ketika pintu gerbang perusahaan ditutup dan karyawan tidak lagi diperbolehkan masuk.

Sebelum penutupan, kata Misno, pekerja telah berupaya melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan untuk mencari penyelesaian. Namun, setelah sekitar tiga bulan tidak ada penyelesaian, para pekerja menempuh jalur mediasi. Dalam proses tersebut, pekerja dinyatakan menang. Namun, hak mereka tetap tidak dibayarkan. Persoalan kemudian berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Serang.

Misno mengatakan, putusan PHI kembali memenangkan para pekerja. Pihak perusahaan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi permohonan tersebut ditolak. "Kasasinya ditolak, artinya kami yang menang. Itu pun juga tidak dibayar," kata Misno.

Karena putusan belum dijalankan, pekerja kemudian menempuh proses aanmaning atau teguran dari pengadilan. Menurut Misno, pemanggilan dilakukan hingga tiga kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, tetapi pihak perusahaan tidak hadir. Proses tersebut kemudian berlanjut ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Namun, setelah masa yang diberikan untuk menyelesaikan kewajiban berakhir, tidak ada penyelesaian sehingga perusahaan akhirnya dinyatakan pailit pada 2018. Dalam proses kepailitan tersebut, persoalan aset perusahaan juga sempat menjadi sengketa.

Misno mengatakan, beberapa hari sebelum putusan pailit, terdapat

transaksi jual beli aset PT Jabatex dengan Panin Bank.

Transaksi tersebut kemudian digugat melalui mekanisme actio pauliana, yakni upaya hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur apabila dianggap merugikan kepentingan kreditor dalam proses kepailitan. Menurut Misno, gugatan tersebut dikabulkan dan transaksi dibatalkan. Upaya hukum lanjutan dari pihak Panin Bank hingga Peninjauan Kembali (PK) juga disebut ditolak. "PK-nya ditolak sampai ada perintah penyegelelan," ujar Misno.

Perintah penyegelelan sebenarnya telah ada sejak 13 Desember 2023. Namun, menurut Misno, pelaksanaannya beberapa kali tertunda dengan alasan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menyebut penyegelelan kembali dipe-rintahkan pada 23 April 2026. Namun, pelaksanaan tersebut juga ditunda menjelang peringatan Hari Buruh atau May Day. "Sudah ada kurator, sudah ada kepengurusan, tinggal penyegelelan," kata Misno.

Penundaan penyelesaian perkara tersebut juga berdampak pada kondisi para mantan pekerja. Misno mengatakan, dari ratusan mantan pekerja yang masih menunggu pembayaran haknya, sebagian telah meninggal dunia. Ia menyebut setidaknya 43 mantan pekerja telah meninggal. "Yang meninggal sampai saat ini sudah 43," kata Misno.

Menurut dia, persoalan tersebut menjadi semakin berat karena

sebagian besar mantan pekerja kini telah berusia lanjut. Mereka juga mengalami kesulitan untuk kembali mencari pekerjaan karena usia. "Rata-

rata orang tua, sudah usia tua. Mencari pekerjaan lagi itu sangat-sangat hal yang tidak mudah," ujarnya.

Misno berharap kedatangan Said Iqbal dapat menjadi momentum untuk memastikan proses penyegelelan dan eksekusi tidak kembali tertunda. "Harapan ini karena Pak Said Iqbal selaku penasihat Presiden sudah hadir menyaksikan langsung," kata Misno.

Direktur Penyelesaian Per-selisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan RI Armando JP

Siregar mengatakan, persoalan PT Jabatex telah berlangsung sejak sekitar 2014. Ia menyebut ratusan mantan pekerja belum menerima hak pesangon setelah perusahaan dinyatakan pailit pada 2018.

Menurut Armando, putusan terkait perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap di PHI dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

"Ini sudah dinyatakan pailit sejak Oktober 2018 dan inkrak di PHI dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,"

kata Armando. Jumlah pekerja yang masih memiliki hak disebut berada pada kisaran 456 hingga 480 orang. Total nilai pesangon diperkirakan mencapai sekitar Rp50 miliar, atau sekitar Rp80 juta per pekerja. (MADE/BNN/RUS)

Ditarget Segera Selesai Secepatnya

Penggantian Ketua DPRD Kota Tangerang Masih Dibahas



Arief Wibowo

patkan Plt Ketua DPRD untuk bisa memimpin DPRD Kota Tangerang selama ketua DPRD belum definitif," kata Arief dalam keterangannya.

Ia juga menjelaskan, tiga fungsi utama DPRD, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi, tetap dijalankan. Salah satunya terlihat dari proses pembahasan kebijakan anggaran yang saat ini sudah selesai dilaksanakan.

"Untuk fungsi penganggaran sendiri saat ini kami sudah selesai melakukan pembahasan KUA PPAS murni tahun anggaran 2027 dan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2026," ungkap Arief.

Nota Kesepakatan KUA PPAS murni tahun anggaran 2027 dan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2026, katanya, telah ditandatangani antara DPRD Kota Tangerang bersama Pemerintah Kota Tangerang pada 14 Agustus 2026.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD murni tahun anggaran 2027 dan RAPBD perubahan tahun anggaran 2026.

Sementara itu, dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD Kota Tangerang juga terus mempersiapkan pembahasan sejumlah Raperda inisiatif DPRD. Dari total lima Raperda inisiatif yang telah disiapkan, sebanyak tiga Raperda akan disampaikan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada 1 September 2026.

"Pada saat yang sama kita juga sedang mempersiapkan proses untuk pembahasan Raperda inisiatif. Ada tiga Raperda inisiatif dari total lima Raperda inisiatif yang akan disampaikan di forum rapat paripurna pada tanggal 1 September 2026. Ini juga sebagai bagian dari komitmen kita dalam melaksanakan fungsi legislasi," kata Arief. (ANT/RUS)

Kepala PKBM Tangerang Tersangka Korupsi Terancam 20 Tahun Penjara

TANGERANG, BANPOS - Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, menetapkan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Indonesia Negeriku, Kidon Ginting (58) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program pendidikan kesetaraan periode 2023-2025, terancam kurungan 20 tahun penjara.

Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Wahyudi Eko Husodo di Tangerang, Selasa (25/8), mengatakan bahwa terhadap tersangka dikenakan Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Atau ancaman hukuman itu maksimal 20 tahun penjara dan minimal dua tahun," katanya.

Ia mengatakan, penetapan ter-sangka korupsi ini berkaitan dengan adanya data siswa fiktif yang tidak sesuai dengan anggaran BOP yang dikur-curkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Ada beberapa siswa yang fiktif yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," katanya menjelaskan.

Menurutnya, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola PKBM Indonesia Negeriku di wilayah Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kidon diduga melakukan manipulasi data siswa selama periode 2023-2025.

Namun, penyidik belum meng-ungkap jumlah siswa yang diduga fiktif karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan dan akan dibuktikan saat persidangan.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Tangerang M Arsyad menambahkan bahwa dalam perkara korupsi tersebut, kerugian keuangan negara sementara diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 miliar. Namun, nilai

sangka korupsi ini berkaitan dengan adanya data siswa fiktif yang tidak sesuai dengan anggaran BOP yang dikur-curkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Ada beberapa siswa yang fiktif yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," katanya menjelaskan.

Menurutnya, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola PKBM Indonesia Negeriku di wilayah Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kidon diduga melakukan manipulasi data siswa selama periode 2023-2025.

Namun, penyidik belum meng-ungkap jumlah siswa yang diduga fiktif karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan dan akan dibuktikan saat persidangan.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Tangerang M Arsyad menambahkan bahwa dalam perkara korupsi tersebut, kerugian keuangan negara sementara diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 miliar. Namun, nilai



Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Indonesia Negeriku, Kidon Ginting (58), digiring petugas ke tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program pendidikan kesetaraan periode 2023-2025 dengan nilai Rp2 miliar.

tersebut masih menunggu hasil audit untuk memastikan jumlah kerugian negara. "Kerugian keuangan negara kurang lebih Rp2 miliar lebih. Tapi untuk pastinya nanti hasil audit dari auditor untuk perhitungan kerugian negara," tuturnya.

Dalam hal ini, pihaknya juga masih mendalami dugaan manipulasi data siswa, menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut. Kejari Kabupaten Tangerang juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka dari pihak lain. (ANT/RUS)

Pemkot Gencarkan Kampanye Antikorupsi Lewat Website Media Sosial Dan Cetak

TANGERANG, BANPOS - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus mengencarkan kampanye antikorupsi melalui berbagai kanal komunikasi publik. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong partisipasi warga dalam mencegah praktik korupsi, khususnya pada sektor pelayanan publik.

Kampanye tersebut menjadi bagian dari keikutsertaan Pemkot Tangerang dalam Program Pariwara Antikorupsi 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini mendorong pemerintah daerah menyampaikan pesan antikorupsi secara luas melalui media konvensional, digital dan aktivitas langsung di ruang publik.

Inspektur Kota Tangerang Achmad Ricky Fauzan mengatakan, kampanye antikorupsi perlu disampaikan melalui kanal yang dekat dengan masyarakat. Menu-

rutnya, penggunaan berbagai media membuat edukasi mengenai integritas dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan mudah dipahami.

"Pesannya antikorupsi harus disampaikan secara konsisten dan melalui berbagai kanal yang digunakan masyarakat. Tidak hanya melalui kegiatan tatap muka, tetapi juga melalui website, media sosial, media cetak dan lainnya," ujar Ricky.

Pemkot Tangerang memanfaatkan website resmi Pemerintah Kota Tangerang, media sosial, serta berbagai kanal digital pemerintah untuk menyampaikan informasi mengenai pencegahan pungutan liar, suap, gratifikasi, nepotisme, benturan kepentingan, hingga penyalahgunaan fasilitas dinas.

Pemanfaatan kanal digital juga diperkuat dengan layanan publik berbasis teknologi. Salah satunya melalui Super App Tangerang LIVE yang menyediakan berbagai layanan

masyarakat dalam satu platform. Hingga akhir 2025, Tangerang LIVE telah mencatat 1.574.168 unduhan, dengan 283.767 pengguna baru sepanjang 2025.

Melalui Tangerang LIVE, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, antara lain LAKSA untuk pengaduan masyarakat, So-bat Dukcapil untuk layanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pajak dan retribusi, perizinan, hingga layanan darurat. "Digitalisasi layanan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat mengakses pelayanan melalui kanal resmi. Warga tidak perlu menggunakan calo atau memberikan imbalan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pelayanan pemerintah," tegas Ricky.

Selain menyampaikan informasi melalui kanal digital, Pemkot Tangerang juga mengedukasi ma-

sarakat mengenai tindakan sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi. Warga diajak menolak pungli, tidak memberikan gratifikasi, menggunakan layanan resmi, serta berani melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

"Kita ingin kampanye ini tidak berhenti sebagai informasi. Masyarakat harus mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menemukan pungli atau praktik korupsi. Begitu juga aparaturnya harus semakin memahami pentingnya menjaga integritas dalam memberikan pelayanan," katanya.

Program Pariwara Antikorupsi 2026 sendiri mensyaratkan kampanye yang masif, kreatif, dan terintegrasi. KPK juga mendorong pemerintah daerah menggunakan berbagai kanal komunikasi, termasuk media cetak, audiovisual, digital, media sosial, dan aktivasi kampanye. (SUG/RUS)